


KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



KOMPILASI KLIPING MEDIA CETAK KEMENTERIAN PERTANIAN RI

21 JUNI 2024


-Biro Humas dan Informasi Publik-

Title	ANTISIPASI DARURAT PANGAN	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	1	
Author	Antara/Basri Marzuki	



ANTARA/BASRI MARZUKI

ANTISIPASI DARURAT PANGAN |
Petani membajak sawahnya dengan traktor tangan di Desa Porame, Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (20/6). Kementerian Pertanian mengantisipasi darurat pangan dengan menggerakkan penambahan areal tanam (PAT) padi pada sawah tadah hujan, memberikan bantuan mesin pompa air, irigasi pompa, traktor, hand-sprayer, dan benih padi serta mendorong pertanaman padi gogo.

Title	Jangan Lengah, Ancaman Krisis Pangan Makin Terasa	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	1	
Author	YK/ers/E-9	

Bencana Kelaparan

Jangan Lengah, Ancaman Krisis Pangan Makin Terasa

JAKARTA - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok bantuan yang membuat proyeksi awal memperkirakan sekitar 756 ribu orang di Sudan akan menghadapi bencana kekurangan pangan pada bulan September.

Perkiraan awal, yang diperoleh pada tanggal 1 Juni dan dilihat oleh *Reuters*, mencerminkan situasi yang memburuk dengan cepat di negara yang dilanda perang tersebut. Proyeksi terbaru yang sebelumnya dirilis pada Desember lalu, menunjukkan bahwa 17,7 juta orang, atau 37 persen dari populasi, menghadapi tingkat kerawanan pangan yang tinggi, namun tidak ada satu pun yang dianggap berada dalam situasi bencana.

Saat ini, diperkirakan 25,6 juta orang, atau 54 persen populasi, menghadapi kekurangan pasokan yang kritis, termasuk lebih dari sembilan juta orang yang berada dalam situasi darurat atau lebih buruk lagi.

Proyeksi terbaru itu masih bersifat awal dan dapat berubah. Hal itu memerlukan persetujuan dari pemerintah Sudan yang dikuasai militer dan PBB serta badan-badan internasional. Pemerintah sebelumnya membantah negaranya sedang mengalami kelaparan.

Analisis terbaru yang dilakukan oleh Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) yang berbasis di Roma mengatakan kalau data yang diperoleh tidak lengkap. Pada bulan Maret, IPC mengatakan ancaman keamanan, hambatan dan pemadaman telekomunikasi di Sudan menghambat kemampuannya untuk melakukan penilaian.

IPC, yang menganalisis data kerawanan pangan dan malnutrisi, berharap dapat menerbitkan laporan mengenai Sudan dalam beberapa minggu ke depan.

Berbagai Faktor

Menanggapi ancaman kelaparan di berbagai belahan dunia itu, Ketua Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana mengatakan apa yang terjadi di Sudan harus menjadi cermin bagi seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia. Bencana kelaparan di Sudan adalah akibat dari kombinasi berbagai faktor, termasuk perang berkepanjangan dan perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan.


Keadaan tersebut, harus menjadi alarm bagi Indonesia untuk lebih waspada dan mengambil langkah-langkah preventif agar tidak menghadapi situasi serupa.

"Indonesia, dengan populasi yang besar dan kebergantungan pada sektor pertanian dan perikanan, harus memastikan bahwa kita memiliki ketahanan pangan yang kuat. Belajar dari situasi di Papua, di mana beberapa wilayah masih mengalami kekurangan pangan, kita harus memperkuat produksi pangan lokal, memastikan distribusi yang adil, dan mengembangkan teknologi pertanian serta perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim," papar Budi.

Selain itu, Indonesia juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan mendukung para petani serta nelayan. Sebagai negara maritim, peran nelayan sangat penting dalam menjaga ketersediaan sumber daya pangan laut. Namun, mereka seringkali menghadapi tantangan besar seperti perubahan cuaca ekstrem dan penangkapan ikan yang berlebihan.

Dengan mengedepankan kerja sama antara Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia bisa menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh. Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan, termasuk pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan, akses terhadap teknologi modern, dan program pendidikan bagi para petani dan nelayan.

"Indonesia harus belajar dari situasi di Sudan dan Papua yang masih ada korban meninggal gara-gara kurang pangan dengan mengambil langkah proaktif untuk mencegah krisis pangan. Kita tidak boleh lengah dan harus terus bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun rakyat Indonesia yang mengalami kelaparan atau kekurangan pangan," tandas Budi. ■ YK/ers/E-9

Title	Kementan Usulkan Tambahan Anggaran 2025 sebesar Rp51,64 T	
Date	21 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ant/E-10	

Kementan Usulkan Tambahan Anggaran 2025 sebesar Rp51,64 T

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan tambahan anggaran untuk 2025 sebesar 51,64 triliun rupiah dari pagu indikatif, yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebesar 8 triliun rupiah.

“Dengan demikian, total pagu anggaran diharapkan nanti menjadi 59,7 triliun rupiah,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (20/6).


Amran menjelaskan usulan tambahan tersebut dibagi menjadi dua yakni untuk program kegiatan reguler sebesar 26,64 triliun rupiah, yang digunakan untuk setiap satuan kerja Kementan dan mendukung asta cita presiden terpilih Prabowo Subianto seperti cetak sawah seluas 1 juta hektare dengan anggaran sebesar 25 triliun rupiah.

Pagu indikatif Kementan tahun anggaran 2025 yang ditetapkan sebesar 8,06 triliun rupiah bersumber dari rupiah murni sebesar 6 triliun rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk gaji dan tunjangan kinerja, sedangkan sisanya 2 triliun rupiah berasal dari nonrupiah murni.

“Diharapkan bisa kembali seperti yang pernah dialokasikan pada 2015,” kata Amran.

Sementara itu, realisasi anggaran 2024 Kementan per 18 Juni 2024 mencapai 5,8 triliun rupiah atau terserap 42,3 persen dari total pagu APBN sebesar 13,73 triliun rupiah dengan memperhitungkan outstanding kontrak. Namun bila memperhitungkan blokir *automatic adjustment* maka realisasinya mencapai 43,74 persen.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementan 2025 akan difokuskan pada empat program yakni ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; nilai tambah dan daya saing industri; program pendidikan dan pelatihan vokasi serta program dukungan manajemen. ■ **Ant/E-10**


Title	Pacu Pompanisasi	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Antara/Aris Wasita	

» Pacu Pompanisasi



ANTARA/ARIS WASITA

» Proses panen padi menggunakan peralatan mesin di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (19/6). Karanganyar ingin meningkatkan angka surplus produksi beras yang pada 2023 mencapai 150.000 ton melalui program pompanisasi, di mana bantuan pompa air tersebar di 50 titik.

Title	Waspadai Dampak Kemarau Panjang	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ers/E-10	

Kerawanan Pangan | BMKG Proyeksikan Musim Kemarau pada 2024 Berlangsung Panjang

Waspadai Dampak Kemarau Panjang

Pembangunan pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat dampak perubahan iklim ekstrem *El Nino*, konflik geopolitik, dan dinamika ekonomi global.

JAKARTA - Pemerintah perlu meningkatkan level kewaspadaan seiring terus meningkatnya suhu permukaan bumi. Fenomena ini membuat dunia dibayang bayangi krisis pangan.

Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) memperingatkan potensi terjadinya ancaman krisis pangan pada 2050. Terkait itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi musim kemarau panjang yang diproyeksikan berdampak signifikan terhadap sektor pertanian nasional.

"Kami berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sektor

pertanian serta kesejahteraan petani di Indonesia," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (20/6).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan musim kemarau pada 2024 berlangsung panjang, mulai Juni hingga September, dengan puncaknya pada Agustus mendatang.

"Beberapa inisiatif yang disiapkan Kementan antara lain peningkatan infrastruktur pompa untuk pengairan lahan sawah tadah hujan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, optimalisasi penggunaan lahan rawa, serta peningkatan kapasitas

dan manajemen waduk/bendungan," kata Amran.

Teknologi budi daya pertanian hemat air dan gerakan panen air hujan juga diperkenalkan untuk meningkatkan ketahanan pangan terhadap dampak kekeringan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan luas tanam padi selama periode Oktober 2023 - April 2024 sebesar 6,55 juta hektare (ha), turun 3,83 juta ha atau 36 persen dibandingkan rata-rata periode sama selama 2015-2019.

Penurunan luas tanam ini mempengaruhi luas panen padi dan berdampak pada penurunan produksi padi nasional.

Saat ini, pembangunan pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat dampak perubahan iklim ekstrem *El Nino*, konflik geopolitik, dan dinamika ekonomi global. Hal itu menyebabkan restriksi ekspor dari beberapa

negara produsen pangan, meningkatnya biaya produksi dan harga pangan, serta potensi krisis pangan.

"Kekhawatiran terhadap jaminan produksi, masalah distribusi, dan akses pangan masyarakat perlu menjadi perhatian serius dalam penyediaan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia," kata Amran.

Pengamatan Kebumihan

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menekankan pentingnya pengamatan sistem kebumihan yang sistematis menghadapi perubahan iklim.

Menurutnya, suhu permukaan bumi meningkat sangat cepat setiap tahunnya yang berdampak buruk pada kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup di Bumi.

Berdasarkan laporan Organisasi Meteorologi Dunia


(WMO), suhu permukaan global telah meningkat dengan cepat, dengan rata-rata tahunan mencapai 1,45 derajat Celcius pada 2023 dibandingkan dengan *baseline* setelah era Revolusi Industri.

Pada 2020, menurut laporan WMO tentang keadaan iklim global, kenaikan rata-rata suhu global adalah 1,2 derajat celcius. Hal ini berarti hanya dalam beberapa tahun, ada peningkatan suhu permukaan yang signifikan.

"Pada 2023 tercatat sebagai tahun terpanas, dan informasi ini hanya dapat diperoleh melalui pengamatan sistematis untuk fenomena kebumihan. Tanpa pengamatan kebumihan yang sistematis, informasi yang diberikan bisa menyesatkan atau salah. Pengamatan kebumihan yang sistematis ini diperlukan baik di tingkat nasional, regional, maupun global," ungkap Dwikorita. ■ **ers/E-10**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Bahlil, Merauke, & Percepatan Swasembada Gula	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	2	
Author	Khudori	

Bahlil, Merauke, & Percepatan Swasembada Gula

Melalui Keppres 15/2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas. Satgas adalah lembaga ad hoc. Pembentukan satgas dimaksudkan untuk mengambil alih tugas-tugas yang melekat pada kementerian/lembaga (K/L). Keberadaan satgas, dengan demikian, adalah pengakuan K/L yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) mengurus industri gula tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Penunjukan Bahlil tentu bukan tanpa alasan. Selama jadi menteri, Bahlil terbukti sebagai salah satu *die hard* Jokowi. Bahlil selalu tampil sebagai pembela terdepan tak kala ada kebijakan pemerintah yang dinilai melawan nalar publik. Dengan sikapnya itu, di satu sisi, Bahlil potensial menjadi musuh publik. Di sisi lain, ia juga jadi ujung tombak Presiden untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang telah ditentang publik. Sebagai politikus Golkar, Bahlil teruji melakoni dua sisi itu. Berbeda dengan pejabat profesional.

Penunjukan Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke mesti dibaca dari dua aspek. *Pertama*, mengefektifkan eksekusi. Saat satgas dibentuk, usia pemerintahan Jokowi tinggal 5 bulan. Dengan kepawaiannya, Bahlil diharapkan fokus pada eksekusi. *Kedua*, menghindari kegagalan berulang. Seperti dimaklumi, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Merauke 'ditabalankan' sebagai lumbung pangan.

Lewat proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate pada 2010, Merauke diproyeksikan jadi pusat produksi jagung, tebu, dan kayu sebagai pangan dan energi. Belasan investor masuk, tapi 3—4 tahun kemudian tutup operasi. Tiada tersisa.

Dalam konteks seperti itu, bisa dipahami jika kemudian saat pertama kali jumpa media sebagai Ketua Satgas, pernyataan Bahlil menimbulkan tanya. Bahlil mengaku ada 2 juta ha lahan di Merauke yang bakal ditanami tebu untuk diolah jadi gula dan etanol. Satu bagian lahan dikelola swasta murni, lainnya dikelola oleh BUMN, Sugar Co, lewat Kawasan Ekonomi Khusus bekerja sama dengan pihak swasta. Wilmar adalah salah satu investor yang disebut. Benarkah di Merauke ada 2 juta ha lahan yang cocok untuk tebu?

Di Keputusan Menko Perekonomian No. 418/2023 tentang Peta Jalan Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol Sebagai Biofuel 2024—2030 ditulis ada potensi lahan 2 juta ha yang cocok untuk tebu. Semua di luar Papua. Benar, Merauke dan Papua ditulis daerah yang cocok untuk tebu. Tapi tidak disebutkan luasan-nya. Merujuk laporan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (2010), 500.000 ha dari total areal 711.071 ha yang sesuai industri gula di luar Jawa ada di Papua. Dari 500.000 ha, 220.000 ha ada di Merauke. Kesesuaian lahan adalah hal dasar. Jika lahan tak sesuai, potensi gagal besar.

Elevasi Merauke datar. Iklimnya, terutama di Malind, Kurik, Jagebob, Muting, dan Okaba cocok buat tebu. Ini ditandai perbedaan musim hujan dan kering yang tegas. Bahkan, bulan kering di Merauke lebih lama sebulan dari Lampung, sentra produsen tebu dan pabrik gula terpenting di luar Jawa. Ini



Khudori
Pegiat Komite Pendayagunaan Petani (KPP) dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

menguntungkan karena periode panen dan giling lebih lama. Demikian juga masa pemasakan. Beda suhu siang-malam optimal buat meraih rendemen tinggi. Air cukup. Jenis tanah grumusol dan podsolik memang kurang subur. Pemupukan, tambahan dolomit dan bahan organik bisa jadi solusi. Intensitas surya yang tinggi di musim kemarau memungkinkan produktivitas tebu dan rendemen tinggi.


Agar tidak berulang, Bahlil dengan Satgas perlu memeriksa penyebab kegagalan MIFEE di masa lalu. Dari belasan investor, ada 5 korporasi swasta yang mengantongi izin menanam tebu dan membangun pabrik gula di Merauke, yaitu Rajawali Corpora, Medco, Wilmar, Hardaya, dan Astra Agro. Masing-masing mengantongi konsesi puluhan ribu ha. Empat tahun (2011—2014) beroperasi, kelimanya gagal dan cabut dari Merauke. Penyebab utama kegagalan adalah serangan penggerek pucuk (Chilo terrelnelus). Keras seperti kumbang, Chilo menyerang pucuk hingga titik tumbuh (meristem), tebu usia 6—7 bulan pun mati. Serangan sampai 90%. Pestisida dan pemberantasan hayati tak mampuan.

Menurut Heru Wientojo,

Senior Manager Planning PT CJM (Cendrawasih Jaya Mandiri), anak usaha Rajawali untuk proyek tebu di Merauke, Chilo punya inang gelagah di hutan. Genus gelagah (*Saccharum spontaneum*) dan tebu (*Saccharum officinarum*) sama: *Saccharum*. Tatkala hutan dibuka untuk tebu, ekosistem pun terganggu. Chilo yang kehilangan inang lalu menyerang tebu, yang kandungan gulanya 100 kali dari gelagah. Tujuh varietas tebu ludes. Kala kebun pabrik gula Bungamayang dibuka di Lampung, tebu diserang walang dan gulma rayutan (*Ipomoea triloba*). Serangan menurun kala luas kebun bertambah. Konsep keseimbangan ekosistem ini mesti diterapkan di Merauke.

Tantangan berikutnya adalah potensi konflik dengan masyarakat. Saat MIFEE bergulir, hampir semua korporasi berkonflik dengan masyarakat adat. Baik karena batas tanah maupun jumlah kompensasi. Bukan hanya izin formal dari birokrasi, restu warga mesti dikantongi korporasi. Ihwal tenaga kerja, bisa mengoptimalkan warga transmigran yang sebagian besar dari Jawa. Kendala lain adalah infrastruktur, termasuk infrastruktur logistik. Bagaimana membuat logistik dari Merauke ke wilayah konsumen kompetitif? Terakhir, Heru Wientojo tatkala saya temui akhir Mei lalu berpesan, "Belajarlah dari kesalahan. Pengalaman adalah guru yang amat mahal." Semoga Bahlil merenungkannya.

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (*curriculum vitae*) singkat tentang diri penulis juga **dilengkapi foto terbaru**. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimkannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel dapat dikirim melalui alamat e-mail redaksi@bisnis.com.

Title	JALIN AGROBISNIS KALTIM-ANHUI	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	6	
Author	M. Mutawallie Syarawie	

| KERJA SAMA INDONESIA-CHINA |

JALINAN AGROBISNIS KALTIM—ANHUI

Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia dan Provinsi Anhui, China menjalin kerja sama sejumlah proyek di sektor agrobisnis. Kerja sama tersebut merupakan langkah awal untuk pengembangan perdagangan buah tropis di masa mendatang.

M. Mutawallie Syarawie
mutawallie.syarawie@bisnis.com

Sebagai langkah awal, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Provinsi Anhui, bakal melakukan peninjauan investasi di sektor pertanian, terutama terkait bahan pengolahan petisida dan herbisida.

Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Akmal bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim tengah melakukan lawatan ke China pada 19–22 Juni 2024.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya melakukan peninjauan investasi dengan produsen bahan pertanian kimia seperti pestisida dan herbisida dengan pabrik asal China, Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd.

“Terkait hal ini, Vice President Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd. Guo Xuejun juga telah melakukan survei di beberapa lokasi di Indonesia untuk investasi.”

Akmal menjelaskan bahwa kerja sama *sister-province* antara Provinsi Kaltim dan Provinsi Anhui ini membuka peluang mencari lahan investasi seluas 1.000 hektare (ha) dengan rantai pasok lengkap dengan posisi strategis di pinggir perairan atau laut.

“Nilai investasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu US\$300 juta untuk investasi awal dan US\$500 juta untuk pengembangan selanjutnya, dengan total investasi senilai Rp13,8 triliun,” jelasnya dalam keterangan resminya, Kamis (20/6).

Dia mengatakan bahwa rencana investasi ini makin mendukung peran Kaltim sebagai mitra strategis Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan dalam upaya prioritas mendukung ketahanan pangan di Kaltim dan IKN Nusantara melalui investasi di sektor pertanian.

“Kami mengundang tim Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd untuk survei dan akan memfasilitasi kebutuhan bahan

baku, lokasi lahan, dan tenaga kerja,” katanya.

Menurutnya, kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan mendukung pembangunan berkelanjutan di kedua provinsi.

Selain itu, Akmal juga turut melakukan audiensi dengan Petroleum LR, yaitu perusahaan pengimpor minyak kelapa sawit guna memberi dukungan untuk ekspor minyak kelapa sawit dan mendorong penghiliran produk turunan kelapa sawit.

Petroleum LR, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Anhui ini, menjelaskan bahwa kebutuhan minyak mentah sawit (*crude palm oil/CPO*) awal mencapai 5.000 ton per bulan.

“Jika kuota terpenuhi, jumlah yang diinginkan akan meningkat menjadi 30.000 ton per bulan,” ujar Akmal.

Adapun, Kaltim sendiri memiliki lahan perkebunan sawit seluas 1,5 juta hektare (ha) dan 106 pabrik pengolahan CPO dengan produksi 4,59 juta ton lewat pasokan sebanyak 19,8 juta ton tandan buah segar (TBS) pada 2024.

“Ekspor terbesar kita adalah ke Tiongkok dan India. Kami akan memfasilitasi kerja sama dengan pengusaha Kaltim yang memiliki sekitar 112 perusahaan sawit,” jelasnya.

Akmal mengungkapkan bahwa salah satu peluang bisnis adalah membangun pabrik biodiesel dan menghasilkan produk turunan dari kelapa sawit.

“Keuntungan dari produk turunan jauh lebih besar daripada sekadar ekspor CPO,” katanya.

Sementara itu, Manajer Umum Shandong Liaohe Huijin Petroleum Sales Co., Ltd Zhou Qiang menjelaskan bahwa Petroleum LR sendiri telah berencana untuk membangun pabrik di Kaltim dan membangun pelabuhan sendiri.

BUMD ini juga sedang menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka untuk pengembangan kelapa sawit.

“Buah-buahan tropis seperti durian juga menarik minat kami. Pasokan ke China selama ini didominasi oleh Malaysia dan Thailand, sehingga pengembangan bisnis buah tropis akan menjadi pilihan berikutnya,” katanya.

Zhou berharap bahwa kerja sama ini dapat memperkuat hubungan bilateral dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kedua provinsi.

KONTRAKSI
Kerja sama tersebut diproyeksi bakal kembali menggerakkan industri pengolahan Kaltim yang pada kuartal I/2024 terkontraksi 0,64% secara tahunan (*year-on-year/YoY*).

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan laju ekspansi dengan mencatatkan pertumbuhan tipis 0,12% YoY pada kuartal IV/2023.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (KPW BI Kaltim)



Pasokan ke China selama ini didominasi oleh Malaysia dan Thailand, sehingga pengembangan bisnis buah tropis akan menjadi pilihan berikutnya.

Budi Widihartanto menjelaskan penurunan ini secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kaltim secara keseluruhan dengan kontribusi negatif sebesar 0,13% YoY. Dia mengatakan penurunan kinerja sektor ini terutama

disebabkan oleh penurunan produksi gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*), dengan indeks produksi LNG turun dari 72,7 menjadi 68,51.

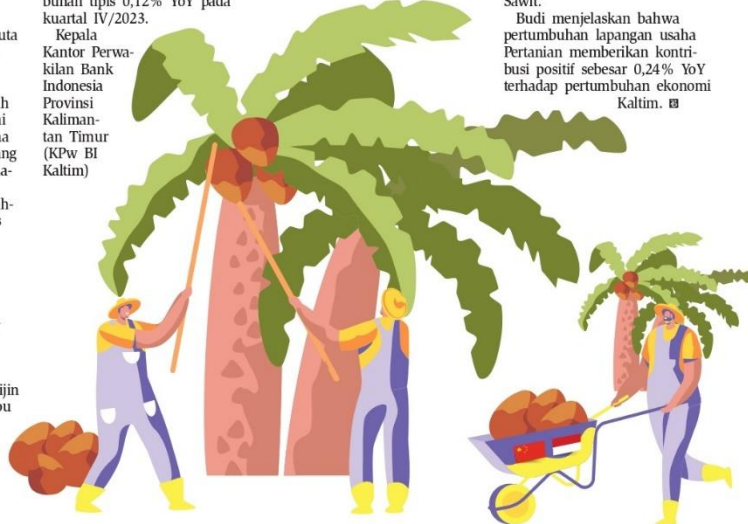
Selain itu, ekspor minyak kelapa sawit (CPO) juga mengalami kontraksi sebesar 8,99% YoY, meski harga CPO menunjukkan peningkatan.

“Penurunan kinerja lapangan usaha industri juga tergambar pada penurunan ekspor CPO meskipun harganya yang tumbuh positif,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Kendati demikian, Lapangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 3,69% YoY.


Kebangkitan ini didorong oleh curah hujan yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas panen serta harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.

Budi menjelaskan bahwa pertumbuhan lapangan usaha Pertanian memberikan kontribusi positif sebesar 0,24% YoY terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim. ■



Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMANTAN

Title	KEMENTAN MINTA TAMBAH ANGGARAN	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	11	
Author	Antara/Aditya Pradana Putra	


■ KEMENTAN MINTA TAMBAH ANGGARAN



Antara/Aditya Pradana Putra

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (*kiri*) berbicara saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/6). Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan

anggaran untuk 2025 sebesar Rp51,64 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebesar Rp8 triliun.

Title	Pengetatan Stok Kerek CPO	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	14	
Author	Sri Mas Sari	

| MINYAK NABATI |

Pengetatan Stok Kerek CPO

Bisnis, JAKARTA — Minyak kelapa sawit mengalami kenaikan terbesar dalam dua minggu terakhir karena para pedagang mempertimbangkan prospek persediaan yang terbatas di Malaysia.

Minyak kelapa sawit ditutup sekitar 1% lebih tinggi di Kuala Lumpur pada Rabu (19/6), lalu naik 0,9% sehari kemudian.

Menurut laporan *Bloomberg*, Kamis (20/6), ada spekulasi bahwa produksi Malaysia mungkin melambat pada Juni, yang dapat menyebabkan kenaikan persediaan di Malaysia lebih kecil dari perkiraan.

“Dalam jangka panjang, sebagian besar mempertimbangkan peralihan dari minyak lobak [*rapeseed*] dan minyak bunga matahari ke minyak sawit karena saat ini minyak tersebut merupakan minyak termurah di pasar minyak nabati,” ujar Paramalingam

Supramaniam, Direktur broker Pelindung Bestari yang berbasis di Selangor.

Di sisi lain, lanjutnya, permintaan masih lambat saat ini karena biaya pengapalan yang lebih tinggi ke hampir semua tujuan.

Pengiriman minyak sawit Malaysia sejauh ini lesu pada Juni, menurut surveyor kargo. Sawit untuk ekspor September di Bursa Malaysia Derivatives kemarin sedikit berubah pada 3.924 ringgit per ton pada istirahat tengah hari atau menguat 5,5% secara tahun berjalan.

Minyak kedelai untuk bulan Desember di Chicago turun 0,4% menjadi 44,28 sen dolar per pon.

Aksi ‘*bargain hunter*’ oleh pasar-pasar impor utama serta kenaikan harga di pasar minyak dan energi pesaingnya mendorong kenaikan harga

minyak sawit ke level tertinggi dalam sepekan pada Rabu.

Menurut Gnanasekar Thiagarajan, Kepala Strategi Perdagangan Dan Lindung Nilai Kaleesuware Intercontinental Ltd, mengatakan pasar CPO didukung oleh pembelian dengan harga murah oleh negara-negara seperti India dan China karena kelapa sawit diperdagangkan dengan harga lebih rendah dibandingkan minyak bunga matahari dan minyak kedelai.

“Kenaikan harga minyak kedelai dalam semalam serta kenaikan harga energi juga mengangkat harga minyak tropis,” tambahnya.

Namun, lanjutnya, kenaikan tersebut dibatasi oleh lemahnya ekspor karena puncak musim permintaan masih jauh, dan peningkatan produksi menambah persediaan.

(Sri Mas Sari)

Title	BSI Garap Potensi Industri Halal Global
Date	21 Juni 2024
Media	Rakyat Merdeka
Page	9
Author	DWI



Kementerian Pertanian

Boyong 20 Buyer Asing Ke International Expo 2024

BSI Garap Potensi Industri Halal Global

Tak hanya di dalam negeri, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI juga menggarap potensi industri halal global. Upaya itu dilakukan dengan menggelar BSI International Expo 2024.

DALAM ajang itu, BSI membawa 20 potensial *buyer* asing yang ditargetkan bisa meraih target transaksi hingga Rp 1 triliun.

Upaya BSI tersebut mendapat dukungan dari Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang hadir dengan membuka BSI International Expo 2024. Wapres menilai, BSI mampu tumbuh menjadi bank terbesar kelima nasional. Dan mengukuhkan posisinya dalam merepresentasikan bank syariah yang modern, inklusif dan mampu bersaing dengan bank konvensional.

"Hadir sejak 2021, BSI didirikan dengan memiliki tujuan jelas, yakni membunikan ekonomi syariah dengan segala kebermanfaatannya yang *rahmatan lil alamin*. Syariah selain (soal) halal, itu keren," katanya dalam membuka BSI International Expo 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (20/6/2024).

BSI juga semakin terdapan dalam menciptakan ekosistem yang mampu menopang dan mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah Indonesia ke depannya.

"*Alhamdulillah*, di tataran global, BSI juga telah menembus 10 besar bank syariah terbesar dunia dari sisi kapitalisasi, membuka cabang di Dubai, dan terus berupaya melebarkan sayapnya di negara lain," puji Wapres.

Menurut Ma'ruf, hal tersebut adalah langkah konkret yang akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama ekonomi syariah dunia.

Dan BSI International Expo untuk pertamanya, sambung Ma'ruf, menjadi sebuah agenda strategis untuk mendemonstrasikan berbagai inovasi dan pengembangan di sektor industri halal nasional dan global.

Dia berharap, kegiatan tersebut dapat diselenggarakan secara konsisten setiap tahun, tidak hanya di Jakarta, tetapi di kota-kota lain.

"Sehingga mendorong UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan pelaku usaha industri halal lokal naik kelas dan mendunia," katanya.

Tak hanya itu, BSI diharapkan dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi antara pelaku usaha di berbagai daerah. Yang kemudian dapat menjadi pendorong utama dalam peningkatan kualitas dan daya saing produk halal Indonesia.

Wapres Ma'ruf melanjutkan, perhelatan BSI International Expo tak sekadar menjadi ajang pameran semata, namun juga harus menciptakan nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional. Serta membuka pasar



BUKA BSI INTERNATIONAL EXPO: Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi (kanan), bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri), dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (tengah) saat membuka BSI International Expo di JCC Senayan Jakarta, Kamis (20/06/2024).

baru bagi produk Indonesia yang halal berkualitas.

"Optimalkan forum-forum pertemuan antarpelaku usaha, seperti acara hari ini (kemarin), untuk menghasilkan kesepakatan bisnis yang konkret baik nasional maupun global," pintanya.

BSI juga diharapkan mampu memperkuat dukungan terhadap pengembangan sektor-sektor produktif, yang menjadi unggulan rantai nilai halal. Dan peningkatan porsi pembiayaan serta pendampingan.

Dia pun mengarahkan pengembangan dan pembiayaan BSI, sebaiknya untuk memunculkan bisnis dan kewirausahaan syariah di sektor-sektor unggulan rantai nilai halal. Seperti pertanian, makanan dan minuman, pariwisata ramah muslim, *fashion*, kosmetik, hingga ekosistem bisnis umroh dan haji.

Tidak lupa, Wapres meminta BSI, sebaiknya untuk memunculkan bisnis dan kewirausahaan syariah di sektor-sektor unggulan rantai nilai halal. Seperti pertanian, makanan dan minuman, pariwisata ramah muslim, *fashion*, kosmetik, hingga ekosistem bisnis umroh dan haji.

Tidak lupa, Wapres meminta BSI, sebaiknya untuk memunculkan bisnis dan kewirausahaan syariah di sektor-sektor unggulan rantai nilai halal. Seperti pertanian, makanan dan minuman, pariwisata ramah muslim, *fashion*, kosmetik, hingga ekosistem bisnis umroh dan haji.

Pihaknya berharap, dengan upaya-upaya yang akan dilakukan, BSI dapat memberikan kontribusi yang semakin besar bagi perekonomian nasional.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika

Wirjoatmodjo mengatakan, di usianya yang ketiga, BSI telah menunjukkan performa impresif.

BSI resmi masuk ke jajaran *Top 10 Global Islamic Bank* dari sisi kapitalisasi pasar, seiring harga saham emiten yang melesat yang mendorong *market cap* perseroan menembus Rp 131,47 triliun pada 13 Maret 2024.

"BSI satu-satunya bank syariah di jajaran Top 10 Bank Indonesia dengan posisi ranking kelima di Indonesia, dengan total aset mencapai Rp 353,4 triliun dan laba bersih sebesar Rp 5,7 triliun pada 2023," rincinya.

Pihaknya juga bersyukur, selain berkontribusi terhadap penerimaan negara berupa dividen dan pajak, BSI juga merupakan pembayar zakat terbesar di Indonesia. Yaitu sebesar Rp 222 miliar pada 2023.

"*Insyaa Allah* akan terus meningkat setiap tahunnya," harap pria yang akrab disapa Tiko ini.

Mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ini menyebut, saat ini BSI telah membuka cabang operasional di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) dan sedang berproses membuka cabang di Saudi Arabia, untuk terus mengembangkan potensi *Islamic Ecosystem*, terutama dari bisnis haji dan umrah.

Di samping itu, BSI menjadi perusahaan terbuka dengan pertumbuhan *market value* yang tinggi, dengan *year on year* (yoy) *growth* 30 persen dan *year to date* (ytd) *growth* 31 persen.

"Dan tergolong perusahaan yang aktif berkontribusi di bursa dan mendorong IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)," katanya.

Tiko mengatakan, acara BSI International Expo 2024 merupakan wujud nyata dukungan BSI terhadap pengembangan *Islamic Ecosystem* secara totalitas di Tanah Air.

Sekaligus memfasilitasi UMKM untuk dapat terlibat aktif dan menjajaki pasar internasional. Karena pada even tersebut, hadir pula belasan negara sahabat. Seperti, Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Inggris, Korea Selatan, Qatar, Jepang, dan Malaysia sebagai *potential buyer* atau *business matching*.

"Mereka (buyer) diharapkan menjadi jalan bagi UMKM binaan BSI untuk *go global*, serta *benchmarking*, bagaimana negara-negara tersebut mengembangkan produk halal," tuturnya.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi menambahkan, sebagai negara dengan penduduk Muslim lebih dari 85 persen, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi *pioneer* sektor halal di dunia, serta menerapkan *halal lifestyle* dalam setiap aktivitas.

Potensi tersebut yang melatarbelakangi pihaknya untuk menggelar BSI International Expo 2024.

"Even ini acara berskala internasional, sebagai wujud komitmen kami terus mendorong perkembangan ekosistem ke-

uangan syariah dan gaya hidup halal," tegas Hery.

Dia melanjutkan, BSI International Expo 2024 merupakan pameran ekosistem keuangan syariah berskala internasional pertama di Indonesia, yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun BSI yang ke-3.


Mengusung tema *Connecting You To Halal Lifestyle Ecosystem*, BSI melibatkan sekitar 65 juta UMKM di Indonesia.

"Dan untuk mendirikan *Global Halal Producer Center* sebagai pusat produsen halal di seluruh dunia, serta meningkatkan kapasitas ekspor produk halal berkualitas ke berbagai belahan dunia," ucapnya.

Diselenggarakan pada 20-23 Juni 2024 di JCC, Senayan, acara ini terdiri atas tiga bagian. Yaitu *exhibition*, yang terdapat lebih dari 265 *tenant*, termasuk UMKM dari berbagai kategori, seperti *Food & Beverage*, *Modest Fashion*, *Automotive*, *Travel*, dan lainnya.

Lalu seminar dan *entertainment*. Dan terakhir, *business matching* dengan menghadirkan sekitar 20 negara sebagai *potential buyer* atau *country pavillion*, yang akan mempertemukan para UMKM dengan pembeli mancanegara. Sehingga UMKM Indonesia dapat masuk ke pasar global.

"Kami menargetkan jumlah pengunjung sebanyak 20 ribu, dan jumlah transaksi senilai Rp 1 triliun," tukasnya. ■ DWI

Title	Daun Kratom Jadi Naik Daun	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	1 Part 1	
Author	UMM	

Dibahas Di Rapat Kabinet Daun Kratom Jadi Naik Daun



“Di Amerika sudah legal bro buat medis.”

@HadiAdi28


SELAIN soal ekonomi dan politik, ada isu daun kratom yang sedang viral. Daun kratom merupakan salah satu tanaman yang dikenal sebagai obat herbal. Meski demikian, daun kratom juga berpotensi membahayakan kesehatan apabila disalahgunakan. Pemerintah memastikan

daun kratom bukan jenis narkoba, tapi bisa dibudidayakan untuk kesejahteraan rakyat.

Kamis (20/6/2024), Presiden Jokowi menggelar Rapat Terbatas Kabinet khusus membahas legalitas daun kratom di Istana Negara. Gara-gara dibahas di Istana, daun kratom pun jadi “naik daun”.

Rapat digelar pukul 10.00 WIB.

◆ BERSAMBUNG KE HAL 7

Title	Daun Kratom Jadi Naik Daun	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	1 Part 2	
Author	UMM	

Daun Kratom Jadi Naik Daun

... DARI HALAMAN 1

Rapat diikuti Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan beberapa menteri terkait. Seperti Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS), Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Selain itu, hadir juga perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta beberapa pihak lainnya. Mereka datang secara bergantian dengan mengenakan pakaian rapi.

Selang beberapa jam, satu per satu menteri keluar meninggalkan kompleks Istana. Mentan Amran kemudian diminta memberikan keterangan pers mengenai isi rapat tersebut.

Kata Amran, Pemerintah akan segera mengatur regulasi terkait budidaya kratom. Tujuannya agar nilai ekonomi dan kualitas dari tanaman kratom dapat terus meningkat.

"Kalau regulasinya sudah diatur, kita budidayakan supaya nilai ekonomisnya, kualitasnya dan seterusnya bisa meningkat. Harga sekarang ini turun drastis karena banyak faktor, seperti kualitasnya, kemudian distribusinya, dan seterusnya," ujar Amran.

Pemerintah, tambah Mentan, sedang mempertimbangkan untuk mengatur kratom di bawah naungan Kementerian Pertanian dengan membentuk korporasi. Melalui korporasi, diharapkan kualitas dan kontinuitas produksi kratom dapat terpenuhi sebagai syarat utama untuk meningkatkan ekspor dan kesejahteraan petani.

"Kita korporasikan sehingga kualitasnya dan kuantitasnya terjamin, karena itu syarat untuk ekspor. Kalau kualitasnya terjamin, pasti otomatis meningkatkan kesejahteraan petani kita," ungkap Mentan.

Lebih lanjut, dia bilang, Presiden dan para menteri terkait juga membahas tentang prospek ekspor kratom yang harga pasarnya saat ini menurun cukup drastis menjadi 2-5 dolar AS,

dari sebelumnya mencapai 30 dolar AS. Pemerintah berharap dengan regulasi yang tepat, budidaya kratom dapat diorganisasi lebih baik melalui korporasi sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas dan stabil dalam pasokan.

Sedangkan aturan teknis terkait budidaya kratom diharapkan juga dapat segera ditetapkan untuk memfasilitasi proses budidaya yang lebih terstruktur dan produktif. Mentan optimistis dengan harga yang menguntungkan, budidaya kratom dapat menjadi pilihan yang menjanjikan bagi petani di Indonesia.

"Kita tunggu, nanti begitu regulasinya sudah ada, budidayanya insya Allah mudah, kenapa? Karena harganya baik, harganya bagus, pernah mencapai 30 dolar," tutur Mentan.

Di kesempatan sama, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Kementerian Kesehatan tidak mengategorikan daun kratom ke dalam golongan narkotika.


Sekalipun Presiden terus menginstruksikan jajarannya untuk memastikan kandungan yang terdapat pada daun kratom.

"Tadi dikatakan Menkes (Budi Gunadi Sadikin), ada satu unsur obat-obatan cancer. Ada untuk obat antinyeri, ini hal positif yang harus diangkat," sebut Moeldoko.

Terlebih, kratom sudah dikonsumsi oleh masyarakat di Kalimantan Barat sejak lama karena menyangkut tradisi. "Dampak positifnya, kata mereka, dampak sosialnya jadi kekuatan sumber energi. Apa ada ketergantungannya? Rendah ketergantungannya, kan nanti baru kecanduan itu cukup rendah," sebut Moeldoko.

Karena itu, menurut Moeldoko, tak perlu lagi ada Peraturan Presiden atau payung hukum lainnya untuk menegaskan legalitas kratom.

Warganet ikut mengomentari soal daun kratom. "Lihat di wikipedia, tanaman kratom banyak manfaatnya untuk pengobatan, meski masih ada pro dan kontra. Aku belum pernah nyicip sih," tweet @NyaiiBubu. "Di Amerika sudah legal bro buat medis," jawab @HadiAdi28. ■ UMM

Title	DPR Diminta Pilih Calon Berintegritas	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	8	
Author	KAL	

Seleksi Anggota BPK DPR Diminta Pilih Calon Berintegritas

KOMISI XI DPR bakal menggelar seleksi calon anggota BPK periode 2024-2029. Masa pendaftaran dimulai kemarin dan akan berlangsung hingga 4 Juli mendatang. Senayan diingatkan untuk memilih calon berintegritas, jauh dari perilaku korupsi.

Pengamat politik dan kebijakan publik Ray Rangkuti mengatakan, BPK berperan penting dalam menghitung angka kerugian negara di kasus korupsi. Hingga sangat mungkin ada kelompok kepentingan menyusupkan calon ke lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

"Tindak pidana korupsi itu kan jejaring. Makanya, mereka harus bisa merangsek ke semua sektor yang berhubungan dengan pengendalian keuangan negara, salah satunya BPK," ujar Ray kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Ray mencontohkan, korupsi proyek base transceiver station (BTS) jaringan 4G. Kasus korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun itu juga menyisakan kasus suap kepada mantan anggota BPK, Achsanul Qosasi.

Karenanya, sambung Pendiri Lingkar Madani (LIMA) Indonesia ini, ada kemungkinan pemain BTS mencoba memasukin 'jago' dalam seleksi calon anggota BPK. "BTS itu kasus besar. Bisa saja, ada yang berkepentingan agar anggota BPK dapat dikendalikan," cetusnya.

Lebih lanjut, Ray meminta panitia seleksi (pansel) calon anggota BPK bentukan Komisi XI DPR mencari berbagai informasi tentang kandidat yang mendaftar. Menurut dia, pansel harus berani bertindak tegas dalam menyeleksi calon yang diduga bermasalah.

"Terpenting, pansel harus berani dan tegas. Kalau mendengar informasi negatif tentang calon, nggak perlu ragu-ragu untuk mencoretnya," pintanya.

Sebab, lanjut dia, calon anggota BPK tak sekadar harus memenuhi persyaratan administratif, tapi harus berintegritas. "Itu mencakup semua, yang bersangkutan (peserta seleksi) itu tidak sedang mengemban kepentingan,

dekat kelompok oligarki, dan dipastikan nggak akan menimbulkan masalah," tandasnya.

Senada, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga mengendus adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu menyelundupkan kandidat dalam seleksi calon anggota BPK. Dia juga memberi peringatan, agar calon anggota BPK yang akan dipilih bukan pencari kerja alias job seeker.


"Hal pertama yang perlu diperhatikan oleh panitia pendaftaran dan masyarakat dalam proses seleksi calon anggota BPK ialah integritas. Kemarin kita sudah mendapat pelajaran beragam dari kasus Achsanul Qosasi, penyevelan ruang kerja Pak Pius (Pius Lustrilang, red), dan kasus di Kementerian Pertanian," ujar Boyamin.

Achsanul merupakan mantan anggota BPK yang terjerat kasus korupsi proyek BTS untuk jaringan 4G. Sementara, Pius merupakan anggota BPK yang ruang kerjanya disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

Boyamin menegaskan, kasus suap yang menyeret auditor maupun anggota BPK menunjukkan adanya integritas yang buruk. Karenanya, ada kemungkinan calon selundupan dari pihak-pihak tertentu, yang akan memanfaatkan BPK untuk menutupi berbagai penyimpangan dan korupsi.


"Saya menengarai ada selundupan-selundupan, penyusupan untuk memanfaatkan BPK demi melindungi orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dari dugaan penyimpangan-penyimpangan," katanya.

Namun, Boyamin belum menyebut calon titipan yang berpotensi diselundupkan ke BPK. Soal adanya politikus yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPK, dia mengingatkan, kandidat tersebut harus memiliki integritas dan kemampuan yang teruji. "Misalnya, teruji itu namanya tidak pernah disebut oleh KPK, termasuk dipanggil sebagai saksi dan segala macam," tambahnya. ■ KAL

Title	LAHAN DAMPAK ROB	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	6	
Author	Rakyat Merdeka	




LAHAN DAMPAK ROB: Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan (tengah) mengendarai traktor saat uji coba lahan di Pekalongan, Kamis (20/6/2024). Pemerintah setempat bersama Kodim 0710/ Pekalongan mengaktifkan lagi areal yang terendam rob sejak 10 tahun lalu menjadi lahan pertanian. Tujuannya untuk swasembada pangan. Areal yang diuji coba luasnya 5 hektar dari total 95 hektar.

Title	RAKER MENTAN & DPR	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	8	
Author	Rakyat Merdeka	



RAKER MENTAN & DPR :
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (ketiga kiri) bersama sejumlah pejabat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Rapat ini terkait Evaluasi Anggaran 2024, Kegiatan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L), Rencana Kerja Pemerintah Kementerian dan Lembaga (RKP K/L) 2025 dan sejumlah isu aktual.

Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka/RM.ID

Title	Kementan akan Cetak Sawah Sejuta Hektare di 2025	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	Tri Listiyarini	

BUTUH ANGGARAN RP 25 TRILIUN

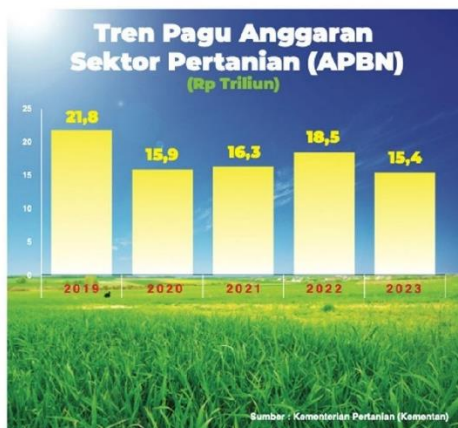
Kementan akan Cetak Sawah Sejuta Hektare di 2025

JAKARTA, ID—Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan tambahan anggaran Rp 51,64 triliun tahun depan, dengan Rp 25 triliun di antaranya untuk mendukung Program Asta Cita pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berupa cetak sawah sejuta hektare. Pagu indikatif Kementan di 2025 hanya Rp 8,07 triliun, dengan usulan tambahan Rp 51,64 triliun maka total anggaran kementerian teknis itu menjadi Rp 59,7 triliun.

Oleh Tri Listiyarini

Menurut Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, saat ini, pembangunan pertanian menghadapi tantangan yang kian kompleks, khususnya akibat dampak perubahan iklim ekstrem El Nino. Belum lagi konflik geopolitik Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, dan perang dagang Amerika Serikat-China yang menyebabkan restriksi ekspor dari negara-negara produsen pangan. Di sisi lain, biaya produksi dan harga pangan meningkat serta muncul dampak dinamika ekonomi global yang berpotensi menimbulkan krisis pangan, kekhawatiran terhadap jaminan produksi, masalah distribusi, dan akses pangan masyarakat. "Tantangan itu perlu jadi perhatian serius, terutama dalam penyediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, mengingat pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 relatif masih terbatas, Rp 8,07 triliun, Kementan mengusulkan tambahan anggaran total Rp 51,64 triliun," ungkap Mentan.

Merujuk Surat Bersama (SBPI) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 dan S-346/MK.02/2024 tertanggal 5 April 2024, pagu indikatif Kementan TA 2025 ditetapkan Rp 8,07 triliun, bersumber dari rupiah murni Rp 6,09 triliun yang di dalamnya termasuk gaji dan tunjangan kinerja pegawai yang cukup tinggi dan sisanya Rp 2 triliun nonrupiah murni. Dengan terbatasnya pagu indikatif TA 2025 itu, Kementan mengusulkan tambahan anggaran Rp 26,64 triliun sehingga pagu indikatif menjadi Rp 34,7 triliun. "Kami berharap anggaran bisa kembali seperti yang pernah dialokasikan pada 2015. Selain itu, Kementan mengusulkan tambahan anggaran pendukung Program Asta Cita presiden-wakil presiden terpilih 2024-2029 khususnya untuk cetak sawah



sejuta hektare Rp 25 triliun sehingga total pagu Kementan nanti menjadi Rp 59,7 triliun. Mohon dukungan Komisi IV DPR untuk usulan tambahan anggaran tersebut," jelas Mentan Amran.

Tingkatkan Produksi

Saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (20/06/2024), Mentan memaparkan, dengan pagu Rp 8,07 triliun, Kementan fokus pada empat program, yakni ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas, lalu nilai tambah dan daya saing industri, kemudian pendidikan dan pelatihan vokasi, serta dukungan manajemen. Keempat program itu dituangkan dalam kegiatan strategis di masing-masing direktorat jenderal dan badan dengan target produksi (*output*) nasional 2025 untuk padi 56,05 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung 16,68 juta ton, kedelai 334 ribu ton, cabai 3,08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772 ribu ton, kakao 641.200 ton, tebu 36,04 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi/kerbau 405.440 ton, dan daging ayam 4 juta ton. "Kami fokus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian demi penyediaan pangan utama bagi penduduk RI dan peningkatan daya saing produk pertanian," kata Mentan.

Pada TA 2024, pagu tetap anggaran Kementan Rp 13,74 triliun. Per 18 Juni 2024, real-

isasi anggaran TA 2023, dengan menghitung *outstanding contract*, mencapai Rp 5,81 triliun atau 42,3% dan dengan mempertimbangkan *automatic adjustment* (blokir) menjadi 43,74%. Dari realisasi anggaran itu, capaian produksi pertanian 2024 untuk padi 29,08 juta ton GKG (52,47% dari target), jagung kadar air 28% 10,59 juta ton (47,22%), kedelai 0,11 juta ton (34,35%), bawang merah 0,66 juta ton (33,21%), aneka cabai 0,85 juta ton (27,52%), kopi 0,38 juta ton (49,36%), tebu 27,67 juta ton (80,62%), karet 1,33 juta ton (49,1%), kelapa 1,42 juta ton (48,93%), dan kakao 0,32 juta ton (48,62%). Selain itu, daging sapi dan kerbau 0,16 juta ton (39,96%), daging domba dan kambing 0,03 juta ton (41,67%), daging ayam ras pedaging 1,59 juta ton (42,69%), telur 2,94 juta ton (45,42%), serta susu 0,35 juta ton (41,67%).


Produksi komoditas pertanian tersebut berasal dari realisasi pengembangan padi 448.525 hektare (ha) atau 25,49% dari target, jagung 329.635 ha (35,05%), kawasan bawang merah 3.675 ha (59,11%), kawasan aneka cabai 2.800 ha (93,33%), kawasan bawang putih 76 ha (100%), kawasan lada 40 ha (40,02%), kawasan pinang 55 ha (55%), kawasan kelapa 1.278 ha (12,11%), dan kawasan karet 190 ha (15,83%). Selain itu, dari optimalisasi reproduksi 743.255 ekor (56,22%), as-

uransi pertanian 107.181 ha (43,07%), irigasi perpompaan 1.445 unit (26,82%), alsintan prapanen 41.552 unit (78,64%), dan alsintan paspanen 332 unit (23,71%).

Stabilisasi Pangan

Sementara itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) juga mengusulkan penambahan anggaran Rp 20,23 triliun tahun depan dalam kerangka penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) guna menstabilkan pasokan dan harga. Rinciannya, penyaluran CPP untuk bantuan beras (enam bulan) Rp 16,68 triliun dan bantuan pangan daging plus telur (enam bulan) Rp 834,11 miliar, lalu penyaluran cadangan beras untuk SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) Rp 1,5 triliun, cadangan jagung untuk SPHP Rp 535 miliar, dan kedelai untuk SPHP Rp 637,8 miliar, serta penyaluran cadangan pangan untuk bencana alam dan keadaan darurat (satu tahun) Rp 37,91 miliar. Di luar itu, Bapanas mengusulkan tambahan anggaran Rp 589,59 miliar, di antaranya untuk pengendalian kerawanan pangan Rp 185,19 miliar serta pemantapan ketersediaan dan SPHP Rp 155,59 miliar. "Kalau berdasarkan SBPI, pagu indikatif anggaran Bapanas di 2025 hanya Rp 329,96 miliar," tutur Arief.

Arief, yang juga hadir dalam rapat kerja Mentan dengan Komisi IV DPR, menyatakan, pemerintah terus mendorong kemandirian pangan dan hal itu tercapai apabila mayoritas CPP berasal dari serapan dalam negeri. Namun demikian, apabila terdapat kondisi tertentu, seperti El Nino pada 2023 dan berlangsung hingga 2024, koordinasi peningkatan produksi domestik sebagai sumber CPP harus diintensifkan. "CPP itu memang sebaiknya dari serapan dalam negeri. Dan bagaimana menaikkan CPP yang dikelola BUMN pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food, itu perlu anggaran, termasuk agar bagaimana langkah itu sekaligus bisa menjaga harga di tingkat petani," ujar dia.


Title	Pemprov DKI Pastikan Harga Beras Stabil	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	11	
Author	Antara	



antara

Pemprov DKI Pastikan Harga Beras Stabil

Pekerja memasukkan beras ke dalam karung di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Pemprov DKI Jakarta memastikan harga beras stabil di pasaran karena stok di Pasar Induk Beras Cipinang mencapai 50 ribu ton serta ditambah kerja sama dengan Bapanas.

Title	Perlu Tiga Kunci untuk Akselerasi Hilirisasi Sawit	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	TI	

Perlu Tiga Kunci untuk Akselerasi Hilirisasi Sawit


JAKARTA, ID—Sedikitnya terdapat tiga kunci untuk mengakselerasi hilirisasi sawit nasional, yakni intervensi pemerintah, penciptaan pasar di dalam negeri, dan penetapan segmentasi produk yang akan disasar. Pemerintah bisa melakukan intervensi dalam proses hilirisasi sawit di Tanah Air dengan melanjutkan skema insentif dan disinsentif yang sudah berlaku saat ini, yakni pajak dan pungutan ekspor.

Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) M Fadhil Hasan menjelaskan, harus ada tiga kunci untuk mengakselerasi hilirisasi sawit di Tanah Air. Pertama, *government intervention*, artinya diperlukan intervensi pemerintah melalui regulasi khusus. Kedua, *market creation*, artinya penciptaan pasar dan penguatan pasar domestik. Ketiga, *product focus and segmentation*, artinya fokus pada produk yang akan dihilirisasi dan segmentasi produk yang akan disasar. “Kita jangan menyerahkan ke industri, itu tidak akan terjadi hilirisasi. Dalam pohon industri, margin terbesar itu ada di hulu dengan hasil minyak sawit mentah (CPO) sebesar 20-30%, makin ke hilir marginnya makin kecil. Kalau mau hilirisasi, salah satu kuncinya intervensi pemerintah untuk membalikkan hal itu melalui regulasi khusus berupa insentif

dan disinsentif, seperti pajak ekspor yang diberlakukan sejak 2011 dan diteruskan dengan pungutan ekspor (*levy*),” ungkap Fadhil.

Dalam diskusi terarah bertajuk Strategi Lanjutan Akselerasi Hilirisasi CPO di Jakarta, Kamis (20/06/2024), Fadhil juga mengatakan, meski intervensi pemerintah melalui regulasi insentif dan disinsentif perlu dilanjutkan, tapi hal itu tidak boleh kebablasan. Larangan ekspor CPO dan beberapa produk turunannya pada periode 2022-2023 merupakan salah satu kebijakan yang kebablasan karena pada akhirnya justru membunuh industri sawit secara keseluruhan dan merusak proses penghiliran sawit domestik yang sedang berjalan. “Dan tidak semua produk itu harus melalui hilirisasi. Contoh Amerika Serikat itu tetap fokus pada ekspor biji kedelai, lalu apa kemudian kita menyebut Amerika kurang *advanced* dalam pengelolaan produk kedelai tersebut,” tutur Fadhil.

Sedangkan Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Setia Diarta memaparkan, salah satu bukti bahwa hilirisasi sawit di Indonesia berjalan baik tercermin dari meningkatnya produk turunan yang dihasilkan dari industri dalam negeri. “Produk turunan sawit pada 2011 masih 48 jenis, namun di akhir 2023 telah meningkat menjadi 185 jenis,” ujar Setia. **(tl)**

Title	Tuntaskan Program Prioritas	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	2	
Author	Investor Daily	

Tuntaskan Program Prioritas

Sejumlah kementerian hingga para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) terlibat perdebatan sengit, belakangan ini. Mereka silang pendapat dalam berbagai kasus, mulai dari aturan impor hingga bantuan sosial (bansos) korban judi online.

Maka tak heran jika muncul anggapan tengah terjadi disharmoni di level menteri pemerintahan terakhir Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah kalangan juga menilai menteri-menteri di KIM sudah tidak solid.

Ada pengamat yang menyebut sebagian menteri kini sibuk mencari mencari panggung agar terpilih lagi di pemerintahan yang dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi, mereka berupaya menarik perhatian dengan membuat pernyataan-pernyataan yang mengandung kontroversi.

Mereka kini dinilai bekerja setengah hati. Fokus utama kini tertuju selepas Oktober 2024, begitu Prabowo memegang kendali pemerintahan.

Ini sangat disayangkan, mengingat seharusnya para menteri fokus menuntaskan program prioritas yang sudah disepakati. Ini demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan reformasi struktural belakangan ini.

Polemik antarmenteri juga merugikan dunia usaha, lantaran kebijakan menjadi tidak konsisten dan berubah-ubah. Contohnya aturan impor yang sudah direvisi tiga

“
Sudah waktunya para menteri mengurangi polemik dan fokus menuntaskan program prioritas yang sudah ada. Para menteri juga lebih baik bekerja sama mengatasi masalah lain yang lebih penting sekarang ini, seperti depresiasi rupiah dan ekses negatif konflik geopolitik.

kali. Ini memicu ketidakpastian di dunia usaha dan bertentangan dengan niat pemerintah mengendalikan impor pada akhir tahun lalu.

Ketimbangberpolemik, para menteri sebaiknya fokus menghadapi masalah yang lebih besar, seperti ketidakpastian ekonomi global yang mengguncang stabilitas makro ekonomi Indonesia. Demikian pula dengan konflik geopolitik yang memanas, sehingga mendongkrak harga energi, seperti minyak.


Kita tahu, ketidakpastian ekonomi dunia berupa tidak jelasnya penurunan suku bunga acuan di Amerika Serikat (AS) membuat rupiah bengep. Kendati Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan rupiah tidak sedalam negara lain, tetap saja rupiah melemah mendekati 6%. Kemarin, rupiah sudah melewati Rp 16.400 per dolar AS.

Ini membahayakan ekonomi, lantaran Indonesia banyak mengimpor barang jadi, bahan baku/bahan penolong dengan menggunakan dolar AS. Depresiasi rupiah berkepanjangan bakal memicu inflasi akibat impor, yang bisa berujung pada pelemahan penjualan produk manufaktur, pertanian, hingga makanan olahan.

Seharusnya para menteri memikirkan lebih dalam masalah ini. Intinya bagaimana *stakeholder* bersama-sama merumuskan strategi penguatan rupiah agar tidak labil ketika diguncang tekanan global. Dalam konteks ini, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kemenko Perekonomian bisa duduk bersama merumuskan strategi peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi, di luar nikel olahan, batu bara, atau CPO.

Ekspor manufaktur lain sudah sepatasnya digeber untuk menambah pundi-pundi devisa, seperti alas kaki, tekstil, hingga otomotif. Ekspor barang ini lebih tangguh ketimbang komoditas yang harganya naik turun, sesuai sentimen global.

Jadi, sudah para menteri mengurangi polemik dan fokus menuntaskan program prioritas yang sudah ada. Para menteri juga lebih baik fokus mengatasi masalah lain yang lebih penting sekarang ini, seperti depresiasi rupiah dan ekses negatif konflik geopolitik. □

Title	Bazar Sembako Jaga Inflasi DKI	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	2	
Author	TIK	

Bazar Sembako Jaga Inflasi DKI

Bazar sembako murah dan Jakarta Food Festival untuk merayakan ulang tahun DKI Jakarta juga untuk menstabilkan ekonomi di wilayah Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Kegiatan bazar sembako murah di Jakarta rutin digencarkan untuk memenuhi ketersediaan pangan murah bagi warga Jakarta. Selain bazar, pada 20-21 Juni digelar pula Jakarta Food Festival. Kedua program ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga inflasi.

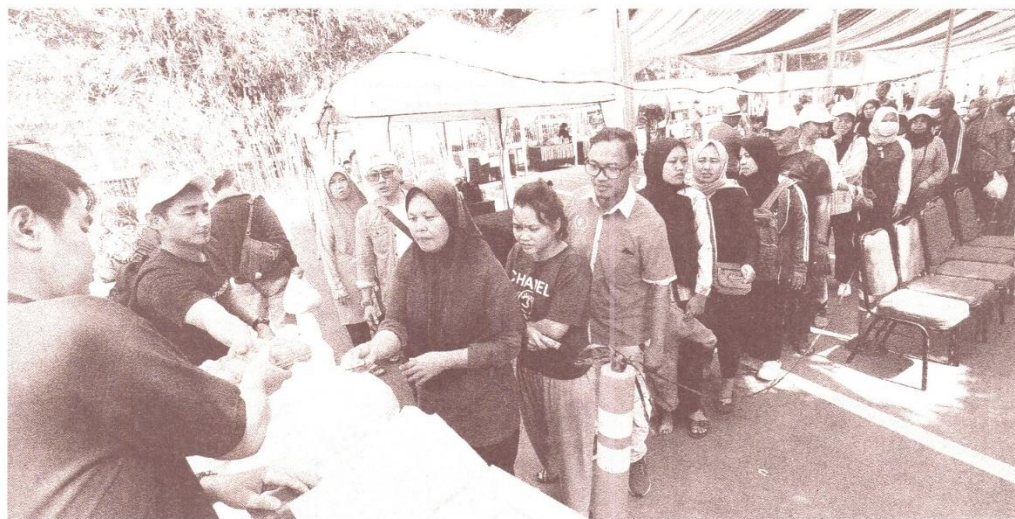
Kamis (20/6/2024), Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Bazar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pasar Jaya di Kantor Pusat Perumda Pasar Jaya, Cikini, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diinisiasi badan usaha milik daerah (BUMD) Perumda Pasar Jaya untuk memperingati HUT Ke-497 Jakarta.

Mulai dari bahan pokok murah, makanan, pakaian, aksesoris, hingga perlengkapan sekolah dijual di bazar. Terdapat 1000 paket sembako seharga Rp 100.000 per paket. Paket ini terdiri dari beras premium 5 kg, tepung terigu 1 kg, minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 1 kg. Disediakan pula cabai merah keriting dan cabai rawit merah.

Heru mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempertahankan laju inflasi. Ia berharap kegiatan ini dapat menstabilkan ekonomi di wilayah Jakarta, termasuk menstabilkan harga bahan pokok.

"Dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta serta bentuk upaya menjaga inflasi agar terkendali, Pemprov DKI Jakarta melalui rekan-rekan BUMD menyelenggarakan serangkaian acara bazar pangan murah. Kali ini, Pasar Jaya mengadakan sembako murah melalui bazar UMKM agar bisa menjangkau masyarakat," tutur Heru.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan tugas kepada dinas terkait untuk berupaya dalam menstabilkan ekonomi di wilayah Jakarta.



KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga mengantre untuk mendapatkan paket sembako murah yang dijual saat gelaran Jakarta Food Festival 2024 di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (20/6/2024). Jakarta Food Festival yang berlangsung sampai Jumat (21/6) ini, merupakan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menstabilkan harga sembako.

nomi di wilayah Jakarta. "Banyak tugas yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta kepada Food Station, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, di wilayah Jakarta," ucapnya.

Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan Widiyanto menyebutkan, Bazar UMKM Pasar Jaya berlangsung selama dua hari, 20-21 Juni 2024. Kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Perumda Pasar Jaya dan Bhakti Istri Pegawai (BIP) Perumda Pasar Jaya untuk menjalin silaturahmi serta meningkatkan kebersamaan antara pedagang, pegawai, dan anggota BIP.

Seorang warga Jakarta Timur, Fajriyah (44), mengatakan,

harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Ia membeli beras tiga karung dengan masing-masing berat 5 kg, lalu membeli mi instan dan gula. "Beras premium di pasar dijual Rp 70.000 per 5 kg, di sini Rp 60.000," ujarnya.

Selain bazar, dalam mengendalikan inflasi, Pemprov DKI Jakarta juga menggelar Jakarta Food Festival 2024 di Pasar Induk Cipinang. Jakarta Food Festival 2024 diikuti pelaku UMKM yang menjual berbagai bahan pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat dengan harga di bawah pasaran. Dengan uang Rp 100.000, warga bisa mendapat beras premium 5 kg, telur ayam 15 butir, minyak goreng 1 liter, susu UHT 4 kotak, dan bawang putih 1 kg.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta memastikan harga beras stabil di pasaran melalui kecukupan stok di Pasar Induk Cipinang dan Food Station. Heru menjelaskan, saat ini Food Station memiliki stok beras hingga 22.000 ton. Sementara Pasar Induk Cipinang mempunyai stok beras di angka 50.000 ton.

Kolaborasi antarlembaga

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Jakarta pada Mei 2024 mengalami deflasi 0,10 persen dilihat secara bulanan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada Mei 2024 memberikan andil deflasi *month-to-month* 0,20 persen.

Komoditas yang dominan memberikan sumbangan def-


lasi *month-to-month* adalah beras sebesar 0,09 persen; daging ayam ras 0,07 persen; udang basah 0,02 persen; serta pepaya, tomat, kangkung, cabai rawit, dan ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembo-lo/ikan aso-aso yang memberikan sumbangan deflasi masing-masing 0,01 persen.

Menurut pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurrahman, inflasi di Jakarta terkendali berkat kolaborasi antarlembaga yang dinilainya cukup baik.

"Tim pengendali inflasi di Jakarta ini sinerginya bagus, ada BUMD, SKPD (satuan kerja perangkat daerah), dan Bank Indonesia. Mereka cukup solid," ucapnya. (TIK)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Embun Es Selimuti Dieng	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	LD/TS/BB/AS/Z-11	

Embun Es Selimuti Dieng

SELAMA dua hari berturut-turut, embun es turun di Kompleks Candi Pandawa Desa Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng). Suhu udara ekstrem tercatat hingga di bawah 0 derajat celsius, tepatnya minus 1,2 derajat celsius. Rerumputan dan tanaman pertanian di daerah setempat pun membeku.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarnegara Sri Utami mengungkapkan fenomena alam itu menarik minat banyak wisatawan. “Banyak wisatawan yang sudah berada di area Candi Arjuna sejak pagi. Mereka beruntung bisa melihat embun es secara langsung,” ujar Sri di Banjarnegara, kemarin.

Kendati demikian, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wonosobo Dudy Wardoyo mengimbau warga yang tinggal di sekitar Dieng dan para wisatawan tetap mewaspadaai fenomena tersebut.

Kendati sudah menjadi agenda cuaca rutin tiap tahun, antisipasi juga perlu dilakukan.

“Ini cukup berbahaya bagi yang tidak terbiasa karena udara dingin bisa sampai terasa menusuk tulang,” terang Dudy.

Ia memperkirakan fenomena

embun es yang membuat kawasan sekitar Dieng membeku bisa terjadi sampai awal September mendatang. “Ini muncul hanya saat musim kemarau saja. Saat musim hujan malah tidak ada,” katanya.


Berbanding terbalik 180 derajat, 13 desa di empat daerah yakni Cilacap, Klaten, Kabupaten Semarang, dan Pati, kini mengalami kekeringan dan krisis air bersih.

Kepala Bidang Kebencanaan BPBD Jawa Tengah Muhammad Chomsul mengatakan pihaknya telah menyalurkan 332 ribu liter air bersih ke seluruh desa yang terdampak. Tidak hanya itu, BPBD bersama pemda setempat juga memberikan pompa untuk membantu mengairi sawah milik warga yang terancam gagal panen.

Di Jawa Tengah, terdapat 3,27 juta hektare lahan sawah yang berada dalam kondisi kritis.

“Kita terus lakukan pemantauan dan antisipasi,” tuturnya.

Sementara itu, Sarjono, salah seorang warga Desa Tambahagung, Kabupaten Pati, mengaku harus membeli air bersih secara mandiri. Ia menyebut bantuan yang disalurkan pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. (LD/TS/BB/AS/Z-11)

Title	Harga Beras Tinggi karena Gagal Panen di Sentra Padi	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	Kristadi	

Harga Beras Tinggi karena Gagal Panen di Sentra Padi

Harga semakin melambung karena sekarang gabah di sentra pertanian Jabar juga diincar para pembeli dari berbagai daerah sentra lain, terutama Jawa Tengah.

KRISTIADI

Kristiadi@mediaindonesia.com

LAHAN sawah seluas 2.000 hektare di Ciamis, Banjar, Garut, Pangandaran, Kota serta Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), mengalami gagal panen. Ribuan area pertanian padi itu diserang hama wereng batang cokelat, tikus, dan burung pipit. Akibat kejadian tersebut, ribuan petani menelan kerugian hingga mencapai Rp3,5 miliar.

"Banyak petani mengalami kerugian setelah lahan yang mereka tanam terserang hama. Kejadian tersebut membuat

produksi gabah menurun drastis dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar," ujar Ketua DPW Gerakan Petani Mandiri Indonesia Wilayah Jabar Yuyun Suyud di Tasikmalaya, kemarin.

Ia mengatakan, dalam kondisi normal, petani bisa menghasilkan 6 ton padi per hektare (ha). Namun, karena serangan hama, produksi mereka hanya menyentuh 2 ton per ha. "Produksi gabah tahun ini hanya mencapai 55%. Sebanyak 45% gagal panen dengan bulir hampa, rusak hingga mati," jelasnya.

Lisna, warga asal Purbaratu, Tasikmalaya, mengatakan harga beras di pasar semakin

mahal. Beras medium yang semula dibanderol Rp12 ribu/kilogram (kg) kini sudah mencapai Rp13.500/kg. Harga beras kualitas premium sekarang sudah di level Rp16 ribu/kg dari semula Rp14 ribu/kg.

"Harga beras sampai sekarang masih belum normal. Masyarakat sangat berharap harga bisa kembali turun ke harga semula," tutur Lisna.

Masih di Jabar, harga gabah yang terus meroket juga terjadi di Indramayu. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu Sutatang menyebut harga gabah kering panen (GKP) saat ini bisa menyentuh Rp7.000/kg dari semula Rp5.500/kg. Harga gabah kering giling (GKG) dijual antara Rp7.500/kg dan Rp8.000/kg.

Ia menjelaskan harga gabah yang tinggi terjadi karena produksi memang minim.

"Sekarang musim hujan

sudah mau selesai sehingga panen semakin sedikit. Itu pasti membuat harga gabah yang dimiliki petani mengalami penurunan," ucapnya.

Harga semakin melambung karena sekarang gabah di sentra pertanian Jabar juga diincar para pembeli dari berbagai daerah sentra lain, terutama Jawa Tengah.

Cari pengganti beras

Dosen Departemen Gizi Kesehatan Universitas Gajah Mada Tony Arjuna mengatakan ketergantungan penduduk Tanah Air terhadap beras harus diubah. Secara perlahan, konsumsi beras harus digantikan dengan bahan pangan lain, baik yang kaya akan karbohidrat maupun kandungan lain seperti protein.

Selain karena Indonesia sulit untuk memenuhi kebutuhan beras yang terus bertumbuh setiap tahun, langkah itu di-


perlukan untuk memperbaiki konsumsi gizi masyarakat.

"Kita bisa lihat kasus anak nelayan yang banyak mengalami *stunting*, padahal penghasilan utama keluarga berasal dari ikan. Ini terjadi karena pola pikir masyarakat adalah harus makan nasi. Padahal, ikan punya kandungan nutrisi yang sangat baik," tuturnya dalam Summer Course 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah berbentuk paket 10 kg beras selama enam bulan berturut-turut. "Bantuan ini adalah bentuk antisipasi pemerintah agar masyarakat tidak kekurangan pangan di musim kemarau panjang. Kami berharap bantuan ini bisa digunakan sebaik mungkin," papar Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. (HT/YK/UL/AU/Z-11)

Dokumentasi


**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	PEMANFAATAN KEMBALI	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	Antara/Harvian Perdana	



ANTARA/HARVIYAN PERDANA

PEMANFAATAN KEMBALI: Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid (kedua dari kanan) mengendarai traktor saat uji coba lahan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, kemarin. Pemerintah setempat bersama Kodim 0710/Pekalongan mengaktifkan kembali tanah yang terdampak oleh rob yang merendam sejak 10 tahun lalu untuk mewujudkan swasembada pangan. Tanah itu menjadi lahan pertanian aktif dengan ditanami bibit padi pilihan tahan air payau dengan luasan lahan uji coba sebesar 5 hektare dari 95 hektare yang ditarget.

Title	Siap-Siap HET Minyakita Naik Pekan Depan	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	7	
Author	Fal /Ant/E-2	

Siap-Siap HET Minyakita Naik Pekan Depan

MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengumumkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau Minyakita akan naik menjadi Rp15.500 per liter pada pekan depan.

“Sudah dibikin dan juga dibahas. Kenaikannya minggu depan,” ucap Mendag di sela kegiatan Forum Sinergitas Ekspor “Strategi Hilirisasi Industri dalam Meningkatkan Ekspor Bernilai Tambah” di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

Sebelumnya, harga HET Minyakita Rp14.000 per liter dan pihaknya mengusulkan kenaikan karena sudah waktunya untuk mengikuti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang saat ini sudah melebihi Rp16.000.

Selain itu, HET Minyakita yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan.

“Karena disesuaikan juga, dulu rupiah Rp14.500, sekarang sudah Rp16.000 lebih. Nanti khawatir kalau enggak disesuaikan ekspornya, jauh

beda harganya. Nanti kami kurang lagi,” kata Mendag.


Menurutnya, naiknya harga Minyakita dari Rp14.000 menjadi Rp15.500 dinilai tetap akan lebih murah dari minyak goreng kemasan premium.

“Jadi, memang sudah saatnya harga Minyakita naik. Kalau minyak premium lebih mahal lagi (dari harga Minyakita),” kata Zulkifli.

Sebelumnya, pengamat pertanian Syaiful Bahari menilai belum saatnya pemerintah menaikkan HET Minyakita karena produksi sawit dan CPO tengah surplus saat ini.

“Sebenarnya pemerintah tidak perlu menaikkan HET Minyakita karena sampai saat ini produksi sawit dan CPO nasional tetap surplus, bahkan produksi CPO di 2023 meningkat 7,15% mencapai 50,07 juta ton. Sedangkan konsumsi minyak sawit di tahun yang sama sebesar 23,13 juta ton, itu pun sudah termasuk untuk program biodisel,” katanya.

Apabila HET Minyakita naik, lanjut dia, harga minyak goreng komersial akan ikut terkerek naik di atas harga sekarang. (Fal/Ant/E-2)

Title	Antisipasi Kemarau dengan Bagikan Pompa	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Bandung Ekspres	
Page	1 Part 1	
Author	Agi/yan	

Antisipasi Kemarau dengan Bagikan Pompa

BANDUNG - Kementan Berikan Bantuan Pompa Gratis untuk Petani di Jawa Barat, Solusi Cepat Tingkatkan Produktivitas

Dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan pompa gratis bagi para petani di Jawa Barat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Mengatakan bahwa setiap pompa yang disalurkan mampu melayani lahan pertanian seluas 50 hingga 100 hektar.

“Hari ini pompa sudah terpasang, satu pompa melayani 50 sampai 100 hektar,” ujar

Amran saat ditemui di Desa Bojongemas, Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Selasa (7/5).

Amran juga menyoroti potensi besar dari penambahan pompa ini. Menurutnya jika 10 ribu pompa bisa melayani 50 hektar perkompa itu artinya 500 ribu hektar sawah bisa tersalurkan.


“Sehingga ini bisa meningkatkan produksi mencapai 1,5 juta ton untuk Jawa Barat. Kemudian petani bisa meningkatkan pendapatan mencapai Rp 15 triliun per tahun dan kalau 10 tahun bisa mencapai Rp 150 triliun,” jelasnya.

► **Baca Antisipasi... Hal 2**



ISTIMEWA

TERKENA PANAS: Kondisi kekeringan yang telah terjadi beberapa tahun lalu di Kabupaten Bandung menyebabkan tanah mengalami retak-retak karena teriknya sinar matahari.

Title	Antisipasi Kemarau dengan Bagikan Pompa	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Bandung Ekspres	
Page	1 Part 2	
Author	Agi/yan	

Ajukan Anggaran Tambahan

■ ANTISIPASI

Sambungan dari hal 1

Dengan adanya pompa tersebut, diharapkan bisa merangsang peningkatan produktivitas pertumbuhan ekonomi bergerak di pedesaan.

“Jadi kami senang melihat, ini yang kita harapkan dulu tanam satu kali bisa menjadi tiga kali. Bayangkan petani naik pendapatannya 300 persen dan minimal 200 persen,” tambahnya.

Kemudian, Kementan juga sudah memastikan pasokan pupuk yang mencukupi dengan meningkatkan sebanyak dua kali lipat.

“Pupuk sudah dipenuhi dua kali lipat,” tegasnya.

Selain itu, program pompa ini juga sudah mencapai penambahan 2700 pompa baru, menyusul 4100 pompa sebelumnya.

“Dan kami akan tambah 6000 pasang semuanya. Totalnya 10 ribu tahun ini untuk di Jawa Barat dan ini terbesar

selama Jawa Barat berdiri,” ungkapnya.

Tak hanya itu, rencananya program pompa ini akan ditargetkan secara nasional sebanyak 90 ribu pompa. Hal ini juga sebagai solusi cepat untuk menghadapi tantangan iklim seperti El Nino.

“Ini solusi juga untuk meningkatkan produksi karena ada elnino dan itu yang tercepat ga ada yang lain,” tegasnya.

Selain itu, anggaran dalam program pompa ini juga mencapai 10 triliun untuk seluruh Indonesia.

“Anggaran total semua itu lebih 10 triliun semuanya dan doakan ini bisa terealisasi cepat dan ini seluruh indonesia kalau Jawa Barat 500 miliar,” terangnya.

Ditanya terkait adanya keluhan dari petani terkait kesejahteraan, Amran menyebut jika dirinya sudah bertemu dengan presiden dan meminta agar HPP harga gabah dinaikkan dari 5 ribu menjadi 6 ribu.

“Jadi yang supaya meningkat kita berikan pupuk 2 kali lipat pupuk subsidi kemudian hpp kita naikkan 20 persen kemudian kita berikan bantuan hibah traktor, pompa luar biasa kita manjakan petani kita,” ungkapnya.

“Alhamdulillah 6 bulan kami ditakdirkan saya yakin petani cukup bahagia dengan kebijakan diberikan presiden,” lanjutnya.

Sebelumnya, Amran Sulaiman membeberkan rencana Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan re-focusing anggaran 2024 sebesar Rp 7,1 triliun. Perombakan alokasi anggaran dilakukan untuk komoditas padi yang dianggap perlu perhatian khusus usai diterpa badai El Nino pada 2023.

“Kita re-focusing anggaran untuk 2024, sebanyak Rp 7,1 triliun ini untuk padi karena padi ini bermasalah kan karena ada el nino,” kata Amran di Gedung Waskita Rajawali Tower pada Senin (8/1).

Kementan juga akan mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke parlemen. “Kan total anggaran Rp 14 triliun, yang lainnya tidak ada re-focusing, kemudian nanti kekurangannya kita tambah lagi di ABT 2024,” tutup Amran.

Sebelumnya Kementan mendapat pagu anggaran di tahun anggaran 2024 sebesar Rp 14,6 triliun. Saat itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, anggaran Rp 14,6 triliun itu akan digunakan untuk mencapai target produksi komoditas pangan utama pertanian di 2024.

Komoditas tersebut meliputi produksi padi 55,42 juta ton, cabai 3 juta ton, kopi 818 ribu ton, kepala 2,9 juta ton, jagung 23,34 juta ton, bawang merah 1,74 juta ton, kakao 694 ribu ton, daging sapi/kerbau 405,44 ribu ton, kedelai 340 ribu ton, bawang putih 45,91 ribu ton, tebu 39,45 juta ton, dan produksi ayam 4 juta ton. **(agi/yan)**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Pesawaran Miliki Potensi dalam Bidang Pertanian
Date	21 Juni 2024
Media	Lampung Post
Page	6
Author	CK1/R10



Pesawaran Miliki Potensi dalam Bidang Pertanian



Dendi Ramadhona
Bupati Pesawaran



■ DOK PEMKAB PESAWARAN

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona bersama Deputi Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Pangan Mayjen (Purn) Yos Triyoso saat acara tanam padi perdana dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pesawaran lumbung pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian RI, di Desa Kutoharjo, Kecamatan Gedongtataan, Kamis (20/6). Turut hadir para Perwira Tinggi Kementerian Pertanian RI, Pj Gubernur Lampung, Danrem 043 Gatam, Danbrigif 4, Danlanal, Ketua Komite Ketahanan Pangan Provinsi Lampung H. Thomas Aziz Rizka.



tupi, hasil produksi pertanian di Lampung diharapkan bisa swasembada pangan dan bisa menyuplai untuk provinsi lainnya," ujarnya.

Dia menambahkan Pemerintah Pusat juga akan fokus melakukan ekstensifikasi, di antaranya dengan penambahan luas lahan. "Saat ini jumlah lahan yang melakukan kegiatan pertanian 7,4 juta hectare. Ke depan secara berjenjang kita akan tambah lima juta hektare lahan pertanian di seluruh Indonesia, satu juta hektare di antaranya berada di Merauke," katanya. "Tapi memang dinamika pasti ada,



han pertanian agar tidak dialihfungsikan, tapi masih ada saja perseorangan yang melakukan hal itu," katanya.

DALAM mendukung program pemerintah ke depan, Kementerian Pertanian melalui Deputi Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Pangan Mayjen (Purn) Yos Triyoso mendukung penggiat pangan di Lampung, khususnya di Pesawaran.

"Kita semua tahu saat ini jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 270 juta jiwa, tentunya ini perlu langkah antisipasi khususnya dalam bidang ketahanan pangan," ujarnya, saat melakukan acara tanam padi perdana dalam rangka mewujudkan Pesawaran lumbung pangan nasional bersama Kementerian Pertanian di Desa Kutoharjo, Kecamatan Gedongtataan, Kamis (20/6).

Turut hadir para perwira tinggi Kementerian Pertanian, Pj Gubernur Lampung, Samsudin; danrem 043 Gatam; danbrigif 4; danlanal; Ketua Komite



Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, H. Thomas Aziz Rizka; Dinas KPTPH Lampung; BBWS; kepala BPSB; Forkopimda Pesawaran; jajaran kepala OPD di lingkup Pemkab Pesawaran; Kemenag Pesawaran; Bapeltan; Bank Indonesia; BSIP; dan Bank Lampung.




Menurut dia, Lampung memiliki potensi yang luar biasa dalam bidang pertanian, salah satunya di Pesawaran, dengan gelaran lahan pertanian yang cukup, tentunya hal ini harus bisa dimaksimalkan.

"Salah satunya dengan membuat *grand design* karena tidak semua provinsi memiliki keunggulan ini. Contoh di wilayah Kalimantan Tengah kegiatan pertanian di sana cukup mahal biaya operasional dan hasil produksi tidak seimbang. Oleh sebab itu, kita buat konsep paralel saling menu-

seperti pembebasan lahan, ini yang juga perlu dukungan dari pemerintah daerah setempat," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, menyatakan pihaknya siap mendukung program pusat, utamanya terkait program ketahanan pangan. "Sebenarnya kami yang sudah kasih masukan terkait kondisi lapangan. Kami lindungi dulu lahannya, makanya ada peraturan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga la-

"Yang kedua kita tahu, Pesawaran *exiting*-nya adalah lahan pertanian dan perkebunan. Kami selalu berikan dukungan kepada petani mulai dari penyuluhan hingga bantuan alsintan, bantuan bibit serta memastikan distribusi dan meminta tambahan kuota pupuk, itu sudah kita lakukan, serta melakukan perbaikan sarana pertanian, seperti irigasi dan lainnya, meskipun secara bertahap," ujarnya. (CK1/R10)

Title	Kementan Diminta Benahi Data Penerima Subsidi Pupuk	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Serambi Indonesia	
Page	6	
Author	Kompas.com	

Kementan Diminta Benahi Data Penerima Subsidi Pupuk

JAKARTA - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) segera membenahi atau memperbaiki data petani penerima subsidi pupuk. Perbaikan ini guna menjamin kelancaran penyaluran atau pendistribusian pupuk subsidi tepat sasaran. Hal ini juga menjawab masalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kelebihan penyaluran subsidi pupuk.

"Terkait dengan data petani, data luas tanam ini menjadi problem dengan distribusi pupuk, sumber data itu ada di desa, ada sensus pertanian, ada BPS, penyuluh pertanian, babinsa, kita bisa mengintegrasikan sumber daya pendataan ini untuk membuat data yang berbasis desa," ungkap anggota Komisi IV DPR, Ono Surono, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Ono menjelaskan, permasalahan seputar penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi berawal dari data yang tidak valid. Dia mencontohkan data petani yang berada di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) banyak yang tidak sesuai dengan data milik petani di KTP, girik, maupun sertifikat.


Masalah perbedaan data ini, dikatakan Ono menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyaluran tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, dirinya meminta Kementan untuk melakukan perbaikan data petani penerima subsidi pupuk berbasis desa dengan mengintegrasikan data sensus pertanian dan melibatkan penyuluh pertanian hingga babinsa.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Saadiyah Uluputty menilai data penerima subsidi yang terdaftar di RDKK banyak yang tidak valid.

"Kalau kita melihat kebijakan pupuk bersubsidi harus ada basis pembenahan basis data, yang valid ini menjadi acuan penentuan RDKK untuk menghindari penyelewengan dari distribusi pupuk, ini spiritnya. Bagaimana pembenahan yang valid, dan apakah sudah ada timeline implementasinya. Kemudian dengan data yang tidak valid, mohon maaf, alokasi pupuk subsidi sering kali tidak tepat sasaran," kata Saadiyah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, bakal segera berkoordinasi dengan BPK untuk menyelesaikan masalah kelebihan salur subsidi pupuk. Ia mengaku permasalahan ini tidak akan dibebankan kepada petani.

(kompas.com)

Title	Stagnasi Kinerja Penegakan Hukum	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	2	
Author	Rangga Eka Sakti/Litbang Kompas	

Stagnasi Kinerja Penegakan Hukum

Di tengah melejitnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah, apresiasi pada penegakan hukum masih stagnan. Kasus-kasus hukum yang belum tuntas menjadi faktor pendorong stagnasi apresiasi publik.

Masih landainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum terungkap dalam survei periodik Kompas, Juni 2024. Berdasarkan survei tatap muka ini, tingkat kepuasan pada bidang penegakan hukum ada di angka 57,4 persen atau sedikit menurun dibandingkan dengan capaian pada survei Desember 2023 (58,3 persen).

Dibandingkan dengan bidang kerja lain, kepuasan pada bidang penegakan hukum ini relatif lebih rendah. Kepuasan pada bidang ekonomi yang acap kali menempati posisi terburuk kini justru berjajar cukup lebar dengan penegakan hukum. Di bidang ekonomi, tingkat kepuasan publik berada di angka 65,1 persen. Adapun tingkat kepuasan pada bidang kerja lain, seperti politik dan keamanan serta kesejahteraan sosial, jauh lebih tinggi, di atas 80 persen.

Dibaca dalam rentang waktu yang panjang, capaian kinerja bidang penegakan hukum kali ini melanjutkan tren stagnasi yang telah terjadi selama lima tahun terakhir. Bisa di bilang, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah soal penegakan hukum ini kembali ke titik awal periode kedua pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

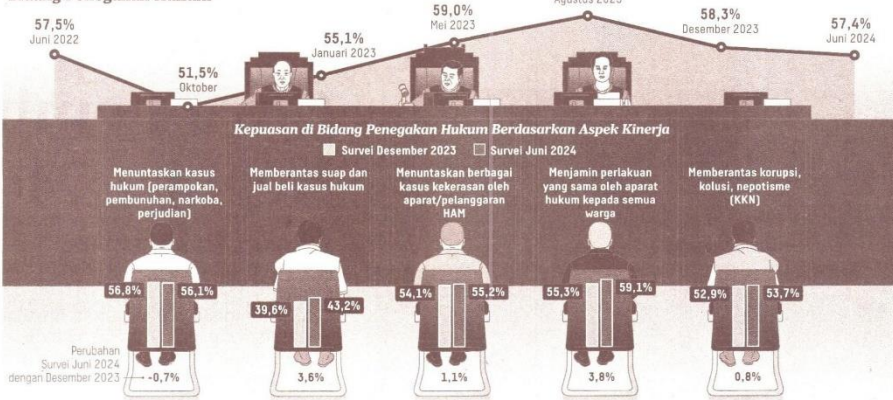
Saat itu, berdasarkan hasil survei Kompas pada Oktober 2019, tingkat kepuasan bidang penegakan hukum berada di angka 55,2 persen. Penilaian ini menunjukkan publik melihat belum ada perkembangan luar biasa dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja di bidang penegakan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek penegakan hukum ini menjadi sektor kinerja yang sangat sulit untuk diperbaiki oleh pemerintahan sekarang. Lebih lanjut, paling minimnya tingkat kepuasan ini juga menjadi peنادa bahwa selain peningkatan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi, kepastian hukum dan keadilan juga mendapat perhatian di benak publik.

Citra penegak hukum

Selain melihat tingkat kepuasan secara umum, survei oleh

Tren Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintah Bidang Penegakan Hukum



Survei periodik melalui wawancara tatap muka dilaksanakan Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode penarikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Penyeleksiannya survei sepenuhnya dibayai oleh PT Kompas Media Nusantara. Terima kasih atas partisipasi Anda mendukung jurnalisme berkualitas.

Sumber: Litbang Kompas/PTKMS

Litbang Kompas juga melihat aspek-aspek dalam kerja-kerja di bidang penegakan hukum. Temuan survei kali ini menunjukkan bahwa jaminan perlakuan yang sama di mata hukum jadi penopang tingkat kepuasan publik.

Dalam aspek ini, tidak kurang dari 591 persen masyarakat menyatakan puas. Dibandingkan dengan survei sebelumnya, penilaian publik terhadap kerja pemerintah dalam hal menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum pada semua warga pun meningkat sekitar 4 persen. Peningkatan ini bisa jadi pertanda baik bahwa kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum masih bisa terjaga.

Hal tersebut juga terkonfirmasi dengan hasil survei kali ini. Beberapa citra lembaga hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),

Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilihat lebih positif dibandingkan dengan survei sebelumnya. Citra positif MA naik 71 persen dan citra KPK naik 8,6 persen. Begitu pula dengan citra Polri yang naik 1,6 persen.

Terwujudnya rasa kesetaraan di mata hukum ini tidak lepas dari pengungkapan kasus hukum yang melibatkan pejabat tinggi negara. Penegakan hukum bagi bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, misalnya, menunjukkan bahwa pejabat tinggi pun tidak kebal hukum di republik ini.

Selaras, penuntasan kasus-kasus kekerasan oleh aparat atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga mendapat apresiasi lebih dari masyarakat. Dalam survei kali ini, 55,2 persen responden puas dengan kerja pemerintah dalam aspek

ini. Capaian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan survei Desember 2023 (54,1 persen).

Hal ini bisa jadi tidak terlepas dari upaya pemerintah yang sejak tahun lalu berupaya menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Saat itu, diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM yang Berat.

Kemudian, pada 2023-2024, pemerintah telah memberikan hak-hak korban untuk tahap pertama. Secara personal, korban, di antaranya, dibangunkan rumah serta diberikan jaminan sosial dan kesehatan, bantuan bevan ternak dan alat pertanian, dan pelatihan keterampilan kerja. Mereka yang telah menerima hak seperti korban pelanggaran HAM berat di

Aceh, yakni pada kasus Rumoh Geudong, Jambu Keupok, dan Simpang KKA (*Kompas*, 16/5/2024).

Korupsi jadi catatan

Di luar kesetaraan hukum dan penyelesaian kasus kekerasan aparat, kepuasan publik di kinerja aspek lain masih tampak stagnan. Salah satunya adalah aspek pemberantasan korupsi yang relatif tidak berubah dari survei sebelumnya.

Di satu sisi, sebagian besar responden (53,7 persen) masih memberi respons positif terhadap kinerja pemerintah terkait pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, dengan 40,9 persen warga menyatakan ketidakpuasannya, ruang untuk perbaikan masih terbuka sangat luas.

Tidak mengherankan, aspek pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum juga masih

mendapat sorotan negatif. Di satu sisi, dibandingkan dengan pengukuran sebelumnya, kepuasan pada aspek ini meningkat 3,6 persen. Namun, aspek ini masih dinilai sebagai yang paling buruk. Hal ini tercermin dari hampir 46,8 persen dari masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya.

Selain soal korupsi, masyarakat juga memberikan catatan terkait dengan aspek penuntasan kasus hukum. Secara umum, kepuasan pada aspek ini memang bukan yang terburuk. Buktiya 56,1 persen responden survei mengaku puas pada kerja-kerja penuntasan kasus kriminal, seperti perampokan, pembunuhan, perjudian, dan narkoba. Meskipun begitu, tingkat kepuasan pada aspek ini relatif menurun tipis.

Tertahannya kepuasan publik di bidang ini bisa jadi didorong oleh mencuatnya ka-

SURVEI KEPEMIMPINAN NASIONAL

Survei Kepemimpinan Nasional Kompas periode 27 Mei-2 Juni 2024 ini diselenggarakan dengan melibatkan 28 panelis Litbang Kompas dan 274 orang tenaga lapangan di 38 provinsi. Penyeleksiannya survei sepenuhnya dibayai oleh PT Kompas Media Nusantara. Terima kasih atas partisipasi Anda mendukung jurnalisme berkualitas.

surus-kasus kriminal yang menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Sebut saja kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat; pembunuhan pemilik rental mobil di Pati, Jawa Tengah; hingga kasus judi daring.

Terkait judi daring perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini mengingat temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2022 hingga 2023 yang menyebutkan tidak kurang dari 3 juta warga Indonesia bermain judi daring. Dalam rentang tersebut, para penjudi telah melakukan transaksi sekitar Rp 34,5 triliun dalam bentuk deposit. Dari jumlah ini, baru sekitar Rp 138 miliar yang transaksinya mampu diintervensi oleh PPATK.

Tak ayal, upaya serius dalam mengenyahkan perjudian daring menjadi kunci untuk memperbaiki kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Dalam perspektif yang lebih luas, kesuksesan pemerintah mengatasi persoalan ini juga berkaitan dengan kinerja bidang lain, seperti ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Apabila bocornya dana hingga puluhan triliun rupiah ini tak bisa ditangani, daya konsumsi masyarakat akan semakin terkikis dan roda perekonomian pun melambat. Ketika hal ini terjadi, permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan bahkan hingga kasus-kasus kriminalitas, pun pasti akan me-rebak.

(RANGGA EKA SAKTI/Litbang Kompas)

Title	Lambung Pangan
Date	21 Juni 2024
Media	Kedaulatan Rakyat
Page	11
Author	Bayu Dwi Apri Nugroho



Kementerian Pertanian

Lambung Pangan

KETAHANAN pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional, apalagi bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dan jumlah penduduk yang besar. Perhatian terhadap ketahanan pangan mutlak diperlukan karena erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional.

Perhatian terhadap aspek ketahanan pangan semakin penting pada saat ini dan tahun-tahun mendatang, hal ini tidak terlepas dari kejadian perubahan iklim global dan berdampak pada penurunan produksi pangan dunia. Sebagai contoh produksi sereal dunia sampai tahun 2050 diperkirakan terjadi penurunan sebesar satu persen, sementara pada periode yang sama penduduk dunia meningkat satu persen. Hal seperti inilah yang berpotensi terjadi kerawanan pangan dalam beberapa dekade mendatang.

Dalam membangun ketahanan pangan, salah satu aspek penting adalah ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup serta adanya sistem kelembagaan di masyarakat dalam pengelolaan pangan. Ketersediaan pangan dibangun melalui peningkatan kemampuan produksi di dalam negeri, peningkatan pengelolaan cadangan pangan, serta distribusi pangan untuk mengisi kesenjangan antara daerah dalam aspek produksi dan kebutuhan.

Masalah pangan bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, namun juga masalah politik, rakyat Indonesia sangat memandang tinggi masalah kemandirian bangsa dan negara, termasuk di bidang pangan. Salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup. Cadangan pangan merupakan salah satu sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah.

Dengan fungsi seperti itu, cadangan pangan sudah barang tentu harus terukur dalam arti kuantitasnya harus diketahui secara pasti sehingga memudahkan untuk melakukan peren-

Bayu Dwi Apri Nugroho

dana dan pelaksanaan program penanggulangan masalah pangan. Salah satu aspek penting dalam pencapaian tersebut adalah ketersediaan cadangan pangan masyarakat dan kemampuannya dalam mendayagunakan sumber pangan yang ada. Keberadaan lambung pangan menjadi salahsatu lembaga cadangan pangan masyarakat telah banyak berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat.

Lambung pangan di sini merupakan salah satu kegiatan dengan membentuk petani-petani binaan atau kelompok-kelompok tani berbasis kawasan di suatu desa yang disertai dengan teknologi dan pendampingan yang intensif dari hulu sampai hilir. Salah satu inovasi teknologi terkini terkait sektor pertanian adalah penerapan teknologi *internet of things* (IoT) yang merupakan konsep pertanian dengan menggunakan bantuan drone dan teknologi sensor, baik tanah maupun cuaca, untuk menganalisis kondisi tanah seperti suhu, pH, kandungan unsur hara, suhu udara, kelembaban, dan arah angin untuk dapat memberikan rekomendasi yang tepat kepada petani agar menghindari terjadinya gagal tanam dan gagal panen serta bisa menjaga kestabilan bahkan peningkatan produktifitas. Saat ini dibutuhkan informasi-informasi kondisi lingkungan di lahan secara cepat dan akurat karena dampak perubahan iklim yang menyebabkan cuaca sangat fluktuatif, dinamis dan sulit diprediksi.

Teknologi merupakan salah satu pilar dari konsep lambung pangan berbasis kawasan yang merupakan sistem pertanian terpadu dalam kawasan yang sudah tersedia stakeholdernya dalam lambung pangan tersebut, antara lain: (1) penyedia saprotan/saprodi sebagai penyedia input dengan pro-

duk- produk yang disepakati dalam lambung pangan, (2) perbankan dan asuransi pertanian, (3) teknologi, menyediakan teknologi yang bisa dimanfaatkan petani, baik di lahan maupun pascapanennya, termasuk teknologi digital untuk penjualan produk hasil petani, (4) penjamin keberlangsungan lambung pangan, dalam hal ini bisa kementerian atau pemerintah provinsi, (5) fasilitator, dalam hal ini adalah dinas pertanian setempat, (6) oftaker, sebagai penjamin bahwa hasil panen petani mampu terserap secara keseluruhan dengan harga yang pantas, dan (7) petani atau kelompok tani itu sendiri sebagai pelaksana didalam lambung pangan.

Solusi pertanian akan menjadi nyata kalau kita lakukan secara komprehensif dan integratif dari hulu dan hilir dengan berbasis kawasan serta adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi serta petani sebagai aktor dalam ekosistem pertanian tersebut. Dengan adanya lambung pangan berbasis kawasan akan menjamin swasembada dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia. (*)

*) **Bayu Dwi Apri Nugroho PhD,**
Dosen FTP UGM.

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Tahan Diri untuk Tidak Berkontroversi
Date	21 Juni 2024
Media	Investor Daily
Page	1 Part 1
Author	Celvin Moniaga Sipahutar, Eva Fitriani, dan Imam Suhartadi



Kementerian Pertanian

Tahan Diri untuk Tidak Berkontroversi

Oleh Celvin Moniaga Sipahutar, Eva Fitriani, dan Imam Suhartadi

JAKARTA, ID - Polemik yang terjadi antarmenteri melahirkan kebijakan inkonsisten yang tidak saja membuat kebingungan publik, lebih jauh turut merugikan dunia usaha. Padahal, masa kerja kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hanya tinggal beberapa saat lagi dan harus dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah pimpinan Prabowo Subianto. Karenanya, para pejabat harus mengurangi kebiasaan berkontroversi di publik dan tidak mengeluarkan kebijakan strategis yang berpotensi membebani pemerintahan selanjutnya.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, tidak solidnya beberapa pejabat kementerian dalam mengeluarkan kebijakan/statement karena ketidakjelasan visi pembangunan ekonomi.

"Ya memang karena tidak ada visi pembangunan ekonomi yang *clear*. Masing-masing kementerian seperti bermain sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi. Ini menambah ketidakpastian berusaha,

dan ini hambatan investasi yang sangat berbahaya," ungkap Redma kepada *Investor Daily*, Kamis (20/06/2024).

Dia berharap, semua kementerian dan pejabat negara lainnya di pemerintahan fokus menyelamatkan kondisi perekonomian dengan menyelamatkan kegiatan ekonomi domestik, khususnya para produsen lokal.

"Karena ini satu-satunya jalan untuk menghindari pengangguran dan krisis yang lebih dalam. Ini seperti para menteri punya target personal yang dikejar di akhir pemerintahan hingga lalai kalau

kondisi ekonomi kita sedang genting," tutur Redma.

Kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) belakangan memang mendapat sorotan di penghujung kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Aroma disharmoni pun mencuat seiring perbedaan pendapat beberapa menteri/pejabat negara.

Contohnya, perbedaan pendapat antara Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait bansos untuk korban judi online.

>> KE-HAL 15



Pembangunan Infrastruktur

- 31 PSN hingga Oktober 2024, meliputi 3 proyek tol, 3 proyek transportasi, 14 proyek bendungan, 1 proyek energi, 11 proyek kawasan
- 10 PSN hingga Desember 2024, meliputi 1 proyek transportasi, 9 proyek bendungan & irigasi
- 4 Proyek transportasi, meliputi 2 proyek kereta api & 2 proyek pelabuhan

SUMBER: BERBAGAI SUMBER

Meningkatkan Iklim Investasi

- Rp1.650 triliun realisasi investasi PMA & PMDN
- 6,2-7% Pertumbuhan investasi melalui penuntasan proyek pembangunan jangka menengah
- Rp662,7-Rp731,1 triliun realisasi PMA & PMDN industri pengolahan yang berfokus pada hilirisasi SDA

Pembangunan SDM

- 14% Target angka stunting nasional
- 4,3% angka pengangguran nasional
- 6-7% angka kemiskinan nasional

Program Pemerintah yang Rampung pada 2024

Silang Pendapat di Kalangan Kementerian

Kemendag - Kemenperin

- Kisruh regulasi impor dalam Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan & Pengaturan Impor yang dirilis untuk mengeluarkan 200 ribu kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Dengan demikian, impor suatu barang tidak memerlukan pertimbangan teknis (pertek) dari Kemenperin.
- Saling sindir dalam kasus impor bahan peledak dimana Kemenperin menilai Kemendag tidak paham dengan regulasi yang diterbitkan sendiri.

Kementerian BKPM - Kementerian PPN

- Silang pendapat terkait investasi IKN dimana Menteri Investasi/Kepala BKPM menyebut belum ada investasi di IKN, sedangkan Menteri PPN/Bappenas menegaskan asing masih *wait and see* terkait penanaman modal di ibu kota baru.

Kemenkeu - Kementerian PPN/Bappenas

- Perbedaan pendapat dalam merespon ketidakpastian defisit APBN 2025 yang bakal menentukan pendanaan program utama presiden terpilih Prabowo Subianto dimana Menkeu menegaskan panduan defisit APBN 2025 berkisar 2,45-2,82%. Namun, Menteri PPN mengusulkan defisit APBN 2025 diturunkan menjadi 1,5-1,8% guna memberi ruang fiskal kepada pemerintahan dalam mengeksekusi program unggulan.

Kementerian BKPM - Kominfo

- Perbedaan pendapat soal investasi Starlink, dimana Menteri BKPM mengaku tak pernah membahas masalah teknis dengan Starlink. Namun, Menteri kominfo telah memastikan Starlink sudah memenuhi semua regulasi.

Kemenko PMK - Kemenko Perekonomian

- Silang pendapat mengenai bantuan sosial untuk korban judi online dimana Menko PMK mengatakan korban judi online bisa menjadi pebansos, sementara Menko Perekonomian memastikan tidak ada anggaran bansos untuk keluarga korban judi online di APBN.

SUMBER: B-UNIVERSE RESEARCH

Title	Tahan Diri untuk Tidak Berkontroversi
Date	21 Juni 2024
Media	Investor Daily
Page	1 Part 2
Author	Celvin Moniaga Sipahutar, Eva Fitriani, dan Imam Suhartadi



Kementerian Pertanian

Tahan Diri untuk Tidak Berkontroversi

> Sambungan dari hal 1

Muhadjir Effendy berencana memberikan bantuan sosial (bansos) untuk keluarga pelaku judi online yang menjadi korban.

Kemudian, krusuh antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian terkait relaksasi impor, dimana terdapat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang melepaskan 20 ribu lebih kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Dengan aturan itu, impor suatu barang tidak memerlukan pertimbangan teknis (perk) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Sejumlah kalangan juga menyoroti ketidakpastian defisit APBN 2025 dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan panduan defisit APBN 2025 berkisar 2,45-2,82%. Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan defisit APBN 2025 diturunkan menjadi 1,5-1,8% untuk memberi ruang fiskal kepada pemerintahan dalam mengekskusi program unggulan.

Tak lama berselang, muncul lagi silang pendapat di kalangan menteri, yakni soal investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahaadiallah menyebut belum ada investasi di IKN, sedangkan Suharso Monoarfa menegaskan asing masih wait and see terkait penanaman modal di ibu kota baru.

Dan yang terkini, terjadi perbedaan pemahaman antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai kratom. Hasil riset BRIN mengatakan bahwa mengandung (narkotika), tetapi dalam jumlah tertentu. Namun, BRIN bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) akan melakukan riset lanjutan terkait kratom. Sebaliknya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merencanakan budi daya kratom setelah diterbitkannya regulasi mengenai tumbuhan tersebut.

Pengamat kebijakan publik, Ahmad Alamsyah Saragih mengungkapkan sejumlah syarat yang perlu dilakukan agar soliditas menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) tetap terjaga hingga akhir masa jabatan. Salah satunya adalah mengurangi kebiasaan berkontroversi di publik untuk membela diri masing-masing.

"Saya berharap kebiasaan ini mulai disadari di masa transisi ini agar jangan sampai ketika terjadi pergantian pimpinan, budaya semacam itu terus berlanjut," ujar Ahmad Alamsyah Saragih saat dihubungi *Beritasatu.com* secara daring.

Menurut Ahmad, para menteri

perlu menahan diri untuk tidak gegabah menyampaikan sebuah pernyataan ke publik. Pasalnya terkadang ada kecemasan yang dialami oleh mereka yang seolah merasa disalahkan terkait dengan suatu kebijakan. Namun, seharusnya yang dilakukan adalah segera ajak stakeholder untuk duduk bersama, saling berkoordinasi, tinjau ulang (review) dan perbaikan aturan itu jika perlu.

"Kemudian sampaikan satu suara ke publik, enggak malu kok minta maaf ke publik bahwa ada sesuatu tetapi kami ingin ini lebih baik," tutur dia.

Dibandingkan jika harus bertengkar terlebih dahulu, kata Ahmad, baru kemudian direvisi dan dibatalkan. Buntutnya ini akan menimbulkan persepsi publik mengenai diskoordinasi maupun disharmonisasi antar menteri KIM yang berimbas pada menurunnya kepercayaan publik.

"Kita tidak punya waktu, negara ini berhadapan dengan situasi global yang semakin kompleks. Hanya kalau kita bisa punya pemerintahan yang cukup kompak dan kuat untuk kita bisa menyelesaikan banyak masalah besar yang akan datang di masa depan," tandasnya.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan agar pemerintah saat ini tidak mengularkan kebijakan strategis yang berpotensi membebani pemerintahan selanjutnya. Menurutnya, pemerintah sebaiknya fokus menyelesaikan program-program kerja yang belum atau sedang berjalan daripada membuat kebijakan baru yang mungkin akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.

"Pada masa akhir pemerintahan ini, seharusnya tidak ada kebijakan strategis yang dibuat," kata Trubus kepada *Beritasatu.com*.

Menurutnya, 1 tahun sebelum masa jabatan berakhir, semua kementerian dan lembaga harus fokus menyelesaikan tugas-tugas mereka, sehingga pemerintahan berikutnya tidak dibebani oleh program kerja yang belum selesai, kecuali untuk program yang sifatnya berkelanjutan seperti program strategis nasional.

Layanan Optimum

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik tetap optimal di pengujung akhir masa kerja Kabinet Indonesia Maju. "Pemerintah tidak sedikitpun terganggu oleh waktu (akan berakhirnya) kabinet ini. Jadi kami tetap memberikan pelayanan optimum," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Saat ditanya mengenai kepuasan publik itu banyak disampaikan oleh masyarakat golongan bawah yang menjadi penerima bantuan sosial, Moeldoko mengatakan bahwa faktanya pemerintah memang tidak

Target Makroekonomi Pemerintahan Jokowi

Indikator	Realisasi Terbaru	Target APBN 2024	Status
Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	5,1	5,2	Berkas
Inflasi (% yoy)	2,8	2,8	Tercapai
Nilai tukar (Rp/USD)	16.368	15.000	Berkas
Suku bunga SBN 10 tahun (%)	7,2	6,7	Tercapai
Harga minyak mentah Indonesia/ICP (USD/barrel)	79,8	82,0	Berkas
Lifting minyak (barrel per hari, ribu)	567,0	635,0	Berkas
Lifting gas (barrel setara minyak per hari, ribu)	885,5	1.033,0	Berkas

SUMBER: BERKAS/CIKIL DAN GIBRAN OLEH UNIVERSITAS RESEARCH

pernah kendur dalam memberikan pelayanan.

Menurutnya hal itu yang menyebabkan publik kemudian memberikan apresiasi kepada pelayanan pemerintah.

"Ya saya pikir pemerintah sampai dengan ujung waktu pemerintahan ini tidak pernah kendur dalam memberikan pelayanan kepada publik. Itu kunci. Kuncinya di situ. Sehingga tidak sedikitpun persoalan muncul karena pelayanan, sehingga masyarakat mengapresiasi. Itu yang perlu dilihat," kata Moeldoko.

Pengamat Politik Universitas Padjajaran, Mudyati Rahmatunnisa, mengatakan, persoalan disharmonisasi setidaknya harus ditinjau lebih mendalam. Namun, menurutnya, saat ini kabinet Jokowi masih terbilang solid. "Jangan terlalu cepat menyimpulkan (disharmonisasi kabinet Jokowi)," kata Mudyati.

Mudyati mengaku turut melihat ketidakdisinkronan sejumlah menteri. Salah satunya yang dia sorot adalah perbedaan pendapat Menko PMA Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dengan bansos untuk korban judi online.

Namun, dia melihat perbedaan tersebut bukan sinyal keretakan soal kabinet. Menurutnya, hal itu lebih kepada dinamika biasa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh para menteri.

"Menurut saya bukan kemudian dengan mudah kita menyebutkan bahwa ada disharmoni, karena disharmoni itu memang tidak hanya sekadar beda pendapat, tetapi mungkin akan kebijakan, perubahan kebijakan dan lain-lain," tutur Mudyati.

Dia menegaskan, perbedaan pendapat antara menteri bukan sebuah hal yang baru dan tidak serta merta berarti kabinet tidak harmonis. Terlebih lagi, lanjutnya, para tokoh partai politik juga telah menyatakan bahwa kabinet tetap solid.

"Ini juga terkonfirmasi dengan pendapat-pendapat para tokoh-tokoh partai mulai dari tokoh Gerindra, Golkar, PAN misalnya menolak pendapat bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam kabinet Pak Jokowi di akhir masa pemerintahannya," terangnya.

Mudyati lantas memandangi bahwa para menteri Jokowi akan



"Jadi di sisa waktu lima bulan ini akan menjadi masa yang sangat penting bagi pemerintahan Jokowi agar tetap menjaga peningkatan kinerja, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi target-target pembangunan nasional," pungkias dia.

Potensi Reshuffle

Pengamat Politik Universitas Padjajaran Mudyati Rahmatunnisa mengatakan Presiden Joko Widodo pasti punya jurus tersendiri guna menjaga soliditas kabinet. Menurut Mudyati, Presiden Jokowi terus menjaga rutinitas untuk melakukan pertemuan dengan menteri-menterinya. Dikatakannya, ini merupakan salah satu langkah Jokowi yang terlihat untuk menjaga soliditas kabinet.

"Bahwa Pak Jokowi sekarang sering melakukan pertemuan dengan menteri-menteri," ucap Mudyati kepada *Beritasatu.com*, Rabu (19/6/2024).

Mudyati mengatakan, dengan terus konsistensi saling terkoneksi, maka Jokowi akan tetap mampu untuk membuat para menteri bisa bekerja sepenuh hati dan jiwa hingga akhir masa pemerintahan.

"Itu adalah tanda bahwa Pak Jokowi menghargai para menteri bisa bekerja sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk bisa mewujudkan targetnya, menyelesaikan pekerjaannya dengan baik," tutur Mudyati.

Dia menilai para menteri Jokowi akan tetap tancap gas menjalankan program pemerintahan hingga masa pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Dia menilai para menteri akan membantu Pak Jokowi untuk meninggalkan legacy terbaik untuk Indonesia.

"Kemenangan presiden terpilih Prabowo Subianto didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). KIM sebagian besar adalah partai-partai pendukung pemerintah. Jadi secara prinsip tidak ada masalah dalam proses untuk transisi dan persiapan menuju pemerintahan yang baru," katanya kepada *Beritasatu.com*.

Menurutnya, kekompakan dan kesolidan para menteri kabinet di bawah kepemimpinan Jokowi karena beberapa ketua umum partai politik (parpol) sering bertemu dan berkomunikasi pada rapat-rapat kabinet.

"Jadi secara waktu tidak ada masalah yang berarti karena setiap saat mereka bisa bertemu dalam ruang meningkatkan kinerja pemerintahan saat ini. Jadi tetap tetap solid dan kompak satu sama lain," ungkap Viva.

Menurutnya Jokowi pastinya mempertimbangkan sisa waktu lima bulan ini dan juga akan tetap mempertahankan agar peningkatan kerja tetap berjalan dengan baik hingga ke masa transisi pemerintahan selanjutnya selesai.

"Hingga sampai sekarang ini roda pemerintahan tidak ada yang terganggu dengan proses persiapan untuk transisi menuju pada pemerintahan yang baru. Apalagi seluruh partai politik mendukung Presiden Jokowi yakni Koalisi Indonesia Maju setiap saat juga bertemu dan berkomunikasi baik," kata Viva.

Silva Yoga menegaskan soliditas seluruh menteri pemerintahan kabinet Jokowi saat ini terbilang masih tetap terjaga dan loyal, serta kerja serius dengan berkomitmen meningkatkan kinerja pemerintah.

cukup tepat," ucap Arifki kepada *Beritasatu.com*.

Arifki mengatakan, Presiden Jokowi bisa saja kembali melakukan reshuffle jika mendapati menteri yang tidak tegak lurus dengannya selama sisa akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Pertama, Jokowi reshuffle menteri-menteri yang bukan menjadi bagian dalam komitmen dia sebagai presiden. Tentu juga akan mempersulit dia untuk meninggalkan legacy lima bulan ke depan," tutur Arifki.

Kedua, Arifki meyakini bahwa Jokowi tak akan segan untuk melakukan reshuffle lagi kepada menteri yang menempatkan kepentingan lain dalam penyelenggaraan negara sehingga tidak fokus dalam bekerja, termasuk mendorong program-program strategis negara.

"Yang paling penting dilihat oleh Pak Jokowi itu adalah seberapa besar nilai keberlanjutan dari program hari ini dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran nanti," jelas Arifki.

Kabar akan adanya perombakan (reshuffle) kabinet di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kembali berembus setelah pertemuan presiden dengan ketua umum partai politik pada akhir Mei 2024. Presiden Jokowi sebenarnya telah membantah akan adanya reshuffle ini. Namun, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan reshuffle tidak tertutup kemungkinan akan ada. Dia menegaskan perombakan kabinet merupakan prerogatif presiden.

Presiden Jokowi telah beberapa kali melakukan reshuffle selama dua periode masa pemerintahannya. Teranyar, Jokowi reshuffle kabinet dengan mengangkat Hadi Tjahjanto sebagai menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).


Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester Matutina menilai tidak masalah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatannya. Menurut Silfester, menteri-menteri yang kerjanya menurun atau tidak satu visi dan misi dengan Presiden Jokowi, layak untuk diganti.

"Kami berharap di akhir pemerintahan, Presiden Jokowi secepatnya menanggapi apabila perlu, tetapi ini tergantung hak prerogatif presiden. Di akhir-akhir masa jabatan ini, menteri-menteri yang tidak performed, boleh saja presiden melakukan pergantian," ujar Silfester kepada *Beritasatu.com*, Kamis (20/6/2024).

Menurut Silfester, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi sebagai bagian dari evaluasi kinerja para menteri. Yang terpenting menurutnya, reshuffle dilakukan berdasarkan data dan fakta yang valid soal kinerja para menteri. (es)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERAN

Title	Anggaran Rp 25 Triliun untuk Asta Cita	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	10	
Author	HEN	

KEMENTERIAN PERTANIAN

Anggaran Rp 25 Triliun untuk Asta Cita

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 51,63 triliun. Dari jumlah itu, Rp 25 triliun akan digunakan untuk mendukung program Asta Cita di sektor ketahanan pangan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), yang digelar secara hibrida, di Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pagu anggaran Kementan Tahun Anggaran (TA) 2025 sangat terbatas, yakni Rp 8,06 triliun. Untuk itu, Kementan mengusulkan tambahan anggaran TA 2025 senilai total Rp 51,635 triliun. Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk meno-

pang program atau kegiatan reguler sebesar Rp 26,625 triliun. Sisanya, Rp 25 triliun, akan digunakan untuk mendukung program Asta Cita presiden-wakil presiden terpilih.

"Program Asta Cita tersebut khususnya berupa pencetakan 1 juta hektar sawah baru," ujarnya dalam rapat kerja itu.

Terkait tambahan dana untuk Asta Cita, anggota Komisi IV DPR, Hermanto, meminta agar Kementan mendetailkan rencana kegiatan dan strateginya. Hal itu penting agar dana tambahan itu tidak sia-sia mengingat nilainya lebih besar ketimbang anggaran reguler.

"Kementan perlu belajar dari sejumlah *food estate* yang dahulu pernah dirintis, tetapi tidak jelas perkembangannya hingga saat ini," ucapnya.

Amran menyatakan, Kementan akan fokus mencetak sawah-sawah baru di dekat sumber-sumber air, terutama sungai. Pencetakan sawah baru itu

juga akan ditopang dengan penyediaan pompa-pompa air. Selain itu, Kementan akan mengoptimalkan sawah yang berproduksi setahun sekali menjadi tiga kali dalam setahun.

Dalam rapat tersebut juga terungkap, Kementan menargetkan produksi padi pada 2025 mencapai 56,05 juta ton setara gabah kering giling (GKG). Target itu meningkat 0,63 juta ton dibandingkan target 2024 yang sebesar 55,42 juta ton GKG.

Tahun ini, hingga 18 Juni, produksi GKG baru mencapai 29,04 juta ton atau 52,47 persen dari target itu. Capaian target kurang optimal lantaran dampak El Nino tahun lalu berlanjut hingga tahun ini.

Amran menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas tanam padi pada Oktober 2023-April 2024 mencapai 6,55 juta hektar. Luas tanam itu turun 36,9 persen atau 3,83 juta hektar jika dibandingkan rerata luas tanam pe-

riode 2015-2019 yang mencapai 10,39 juta hektar.

Penurunan luas tanam itu akan menyebabkan penurunan luas panen dan produksi padi nasional. Namun, hingga September 2024, produksi padi diperkirakan mencukupi karena masih ada padi yang ditanam dan siap panen.


"Yang berbahaya adalah pada Oktober, November, dan Desember 2024 karena belum diketahui berapa kami mampu tanam padi. Hal itu mengingat Indonesia bakal mengalami musim kemarau panjang yang diperkirakan memuncak pada Agustus 2024," tutur Amran.

Produksi beras nasional tahun ini diperkirakan turun 3,8 juta ton. Pemerintah telah memutuskan mengimpor 3,6 juta ton beras.

Pekan lalu, Bapanas menyebutkan, potensi penurunan produksi beras nasional tahun ini mencapai 5 juta ton. Impor diputuskan 3,6 juta ton. (HEN)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Legalisasi Kratom	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Papua Pos Nabire	
Page	8	
Author	Ist	

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Legalisasi Kratom

JAKARTA, -- Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas wacana legalisasi kratom.

Beberapa menteri yang sudah hadir adalah Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Rapat dimulai sekitar 10.00 WIB.

"Rapat tentang kratom ya. Saya pikir ada tiga hal yang pertama tata kelola," kata Moekoko sesaat sebelum memasuki Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6).

Moekoko mengatakan selama ini belum ada standarisasi pengelolaan kratom. Menurutnya, masyarakat sering mengalami hambatan saat ekspor karena belum ada standar jelas.

Kementerian Perdagangan juga sedang menyusun tata



niaga perdagangan kratom. Dengan demikian, akan ada kepastian para pemangku kepentingan.

Rapat hari ini juga membahas persoalan legalisasi kratom. Menurutnya, memang masih ada perbedaan pandangan beberapa instansi terhadap penggunaan kratom.

"Masalah penggolongan masih ada perbedaan antara BNN dengan hasil riset dari BRIN. Kita ingin memastikan


sebenarnya seperti apa sih kondisi kratom itu, masih ada perbedaan persepsi," ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah instansi pemerintah berbeda pendapat tentang kratom. Tanaman itu disebut bisa menjadi alternatif pengobatan, tetapi ada penelitian soal tingkat candu.

"Kalau memang lebih banyak manfaatnya, itu pertimbangan hukumnya apa? Pertimbangan etisnya apa? Tapi kalau lebih

banyak mudaratnya atau daya rusaknya, untuk apa kita lakukan?" ucap Kepala BNN Irjen Marthinus Hukom di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12).

Saat ini kratom belum masuk UU Narkotika. Kratom juga tak masuk dalam golongan narkotika, seperti yang tertuang di Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. (ist)

Title	Tak Dikategorikan Narkotika Pemerintah Akan Legalisasi Daun Kratom	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Kompas	
Page	13	
Author	WKM	

TANAMAN

Tak Dikategorikan Narkotika, Pemerintah Akan Legalisasi Daun Kratom

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait rencana legalisasi tanaman kratom atau purik—bernama Latin *Mitragyna speciosa*—bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat itu juga difokuskan pada pembahasan potensi budidaya kratom di Indonesia untuk meningkatkan nilai ekonomis dan kualitas produksi tanaman. Saat ini, kratom yang kerap dijadikan obat tradisional, harganya tengah anjlok di pasar ekspor.

Setelah menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024), Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut sebanyak 18.000 keluarga di Kalimantan Barat menggantungkan hidup dari produksi kratom. Oleh karena itu, pemerintah akan membuat pengaturan tentang tata kelola, tata niaga, dan legalitas kratom yang sudah diekspor ke sekitar 20 negara.

Menurut Moeldoko, Kementerian Kesehatan telah menyatakan kratom tidak masuk kategori narkotika. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga telah diminta untuk membuat penelitian terkait dengan kratom. "Berikutnya memang ada adiktifnya, tapi dalam jumlah tertentu. Maka, dikejar lagi supaya BRIN lakukan langkah riset lanjutan untuk ketahu seberapa besar sesungguhnya ini bahaya?" ujar Moeldoko.

Kratom merupakan salah satu tanaman endemik di Indonesia, tepatnya di Kalimantan,

dan ditemukan pula di Thailand, Malaysia, dan Papua Nugini. Di sejumlah daerah di Kalimantan, kratom dikenal dengan sebutan daun sapat, kedemba, dan purik (Kompas.id, 24/1/2020).

Penduduk lokal Kalimantan menggunakan daun kratom sebagai pereda nyeri. Di Amerika Serikat, daun kratom digunakan sebagai obat rekreasi dan sebagai opioid yang tersedia dalam bentuk ekstrak, bubuk, atau suplemen.

Hingga 2016, daun kratom dilarang digunakan sebagai obat, seperti diatur dalam Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK 04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna speciosa* (Kratom) dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Di dalam ketentuan itu disebutkan, kratom mengandung alkaloid mitragynine yang pada dosis rendah mempunyai efek stimulan dan pada dosis tinggi memiliki efek sedatif narkotika atau penenang.

Pada 2019, Badan Narkotika Nasional juga mendukung Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika yang mengklasifikasikan kratom sebagai narkotika golongan I.

Arahan lanjutan riset

Mengingat sebelumnya ada larangan penggunaan kratom, menurut Moeldoko, Presiden Jokowi pun memberikan arahan agar Kementerian Kesehatan, BRIN, dan BPOM melan-

jutkan riset untuk kepastian seberapa aman kratom bagi masyarakat. Kementerian Perdagangan juga diminta mengatur tata niaga kratom agar kualitasnya terjaga. "Untuk bentuk suatu standardisasi sehingga tak ada lagi kratom produk Indonesia yang mengandung bakteri E.coli, salmonela, logam berat," kata Moeldoko.

Moeldoko menegaskan bahwa kratom secara tradisional sudah dikonsumsi masyarakat Kalimantan Barat. Kratom sekaligus menjadi kekuatan sumber energi. Dalam rapat tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyinggung manfaat kratom untuk pengobatan kanker dan antinyeri.

Apa ada ketergantungannya? Rendah ketergantungannya, kan, nanti baru kecanduan itu cukup rendah," ucap Moeldoko.

Ketika ditanya terkait kajian kratom dari sisi kesehatan, Budi Gunadi justru meminta wartawan agar bertanya kepada Moeldoko. Namun, dia menegaskan, dari sisi kesehatan, pemerintah mengikuti pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Kesehatan kita ikut WHO, ya, jadi WHO masih masukin ini dalam kajian," ujar Menkes.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam keterangan pers setelah rapat, menyampaikan bahwa pemerintah akan segera mengatur regulasi terkait budidaya kratom di Tanah Air. Hal tersebut penting agar nilai ekonomi dan kualitas dari tanaman kratom dapat

terus meningkat.

Kratom untuk sementara ini masuk dalam kategori tanaman hutan. Namun, tanaman ini ke depannya disarankan bisa masuk kategori tanaman pertanian apabila regulasinya sudah diatur dan telah dibudidayakan sehingga nilai ekonomis ataupun kualitasnya bisa meningkat.

"Saran kami, nanti mungkin kalau ini regulasinya sudah diatur mungkin kita budidayakan ke depan supaya nilai ekonomisnya, kualitasnya, dan seterusnya bisa meningkat karena harga sekarang ini turun drastis karena banyak faktor: kualitasnya, kemudian distribusinya, dan seterusnya," ujar Andi Amran.

Dia juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengatur kratom di bawah naungan Kementerian Pertanian dengan membentuk korporasi. Melalui korporasi tersebut, diharapkan kualitas dan kontinuitas produksi kratom dapat terpenuhi sebagai syarat utama untuk meningkatkan ekspor dan kesejahteraan petani.

"Kalau ada koperasi yang mengelola ini, kita korporasikan sehingga kualitasnya terjamin, kuantitasnya terjamin, karena itu syarat untuk ekspor. Kalau kualitasnya terjamin, pasti otomatis meningkatkan kesejahteraan petani kita," ucapnya.

Prospek ekspor

Dalam rapat tersebut, Presiden dan para menteri terkait

juga membahas tentang prospek ekspor kratom yang saat ini harga pasarnya telah menurun cukup drastis menjadi 2-5 dolar per unit, dari sebelumnya mencapai 30 dolar. Pemerintah berharap dengan regulasi yang tepat, budidaya kratom dapat diorganisasi lebih baik melalui korporasi sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas dan stabil dalam pasokan.


"Yang terpenting kuantitasnya, dalam hal ini kuantumnya, kemudian kualitasnya sehingga dulu harga 30 dolar, sekarang jatuh sampai 2 dolar, 5 dolar, nah ini jatuh terlalu rendah," ucap Mentan.

Adapun aturan teknis terkait budidaya kratom diharapkan juga dapat segera ditetapkan untuk memfasilitasi proses budidaya yang lebih terstruktur dan produktif. Andi Amran optimis bahwa dengan harga yang menguntungkan, budidaya kratom dapat menjadi pilihan yang menjanjikan bagi petani di Indonesia. "Kita tunggu, nanti begitu regulasinya sudah ada, budidayanya insya Allah mudah, kenapa? Karena harganya baik, harganya bagus, pernah mencapai 30 dolar AS," tutur Mentan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa harga ekspor kratom turun karena kualitas mutu produknya yang buruk. "Rapat memutuskan akan diatur tata niaga kratom agar Mendag mengatur mengenai eksportir yang terdaftar sehingga mutu standar akan dikendalikan," ujar Zulkifli. (WKM)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Pemerintah Tetap Fokus Cetak Sawah	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Harian Jogja	
Page	12	
Author	Akbar Evandio dan Dwi Rachmawati	

▶ AKUISISI PERUSAHAAN BERAS

Pemerintah Tetap Fokus Cetak Sawah

JAKARTA—Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian akhirnya menjawab ihwal santernya rencana Perum Bulog mengakuisisi perusahaan beras asing. Meski mendukung, pemerintah bakal tetap fokus pada pengoptimalan sawah dalam negeri.

Akbar Evandio dan Dwi Rachmawati
redaksi@jibinews.co

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengaku mendukung rencana Perum Bulog mengakuisisi perusahaan beras asing, salah satunya di Kamboja.

Pasalnya, seiring dengan rencana akuisisi tersebut, kementeriannya bakal lebih fokus dalam mengoptimalkan sumber daya dalam negeri.

Dia menuturkan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) memiliki tugas dalam pengoptimalan hasil sawah. Mengingat, belum lama ini program pengadaan pompa juga telah berjalan.

"Fokus pertama pengoptimalan sawah, pengadaan pompa, ke

▶ Swasembada sempurna beras pernah terjadi selama tiga tahun berturut-turut pada 2017-2020.

▶ Dari sisi potensi lahan padi, Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan Kamboja.

depan mungkin kami akan cetak sawah. Negara kita luas dan pernah swasembada sempurna, definisinya impor maksimal 10 persen itu definisi swasembada, saat itu swasembada sempurna karena impor beras medium nol persen," ujarnya di Istana Merdeka, Kamis (20/6).

Dia mengatakan swasembada sempurna itu terjadi selama tiga tahun berturut-turut pada 2017-2020.

Untuk itu, kata dia, kementeriannya mengusulkan tambahan anggaran belanja 2025 hingga Rp51,6 triliun. Di antaranya bakal digunakan untuk program cetak 1 juta hektare sawah.

Dia mengatakan dalam pagu indikatif Kementan untuk belanja 2025 ditetapkan sebesar Rp8,06 triliun. Pagu indikatif tersebut dianggap terlalu minim untuk menunjang kinerja Kementan di tahun depan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest), Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan rencana akuisisi sejumlah rencana dari perusahaan BUMN ke pasar internasional. Mulai dari PT Pertamina (Persero) ke Brasil dan Perum Bulog ke Kamboja.

Tidak Logis

Sebaliknya, Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar), Syaiful Bahari justru menilai rencana pemerintah mengambil alih bisnis pabrik beras di Kamboja tidak logis.

Pasalnya, dari sisi potensi lahan padi, Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan Kamboja. "Potensi lahan padi Indonesia yang belum dimanfaatkan di lahan kering ada 25 juta hektare. Akuisisi usaha beras di Kamboja itu pemikiran yang tidak mendasar dan tidak logis," ujar Syaiful.

Selain itu, dengan mengambil alih produsen beras di Kamboja, maka industri beras rakyat akan makin tertekan dengan gempuran beras impor di tengah biaya produksi yang kian mahal.

"Dampak itu akan semakin parah dirasakan oleh penggilingan padi rakyat yang hanya mampu menghasilkan beras kualitas medium atau lebih rendah." (JIBI/Bisnis.com)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	Riset Lanjutkan Kapas Organik Digaransi Pasar Dalam Negeri	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Suara Ntb	
Page	4	
Author	Ari	

Contoh Model di NTB

Riset Lanjutan Kapas Organik Digaransi Pasar Dalam Negeri

Tanjung (Suara NTB) -

Riset Kapas Organik tahap kedua di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menyasar 5 desa sebagai proyek percontohan. Kolaborasi lintas lembaga melibatkan Fakultas Pertanian Prodi Ilmu Tanah - Universitas Mataram, Yayasan Sukkha Citta, Sejati Farm Lombok, pakar ilmu kapas dari BRIN, pegiat pertanian kapas, serta mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Pertanian Unram, akan diperluas dengan garansi hilirisasi (pasar) yang jelas. Sehingga ke depan, budidaya kapas di tingkat petani dapat berkelanjutan dan tidak "bernasib" sama seperti tanaman jarak pagar.

Fasilitator Kegiatan Pengembangan Kapas Organik Tumpang Sari, Wawan Setyawan, S.S., M.P., yang juga owner Sejati Farm Lombok, kepada *Suara NTB*, Kamis (20/6) mengungkapkan, riset budidaya kapas di KLU akan dilanjutkan.

Riset kedua di KLU sekaligus yang ketiga di NTB (sete-

lah riset pertama di Sumbawa), merupakan trial mendalam pengembangan kapas metode tumpang sari. Di sela-sela kapas, akan ada tanaman lain yang bernilai ekonomi untuk menambah penghasilan petani seperti jagung, kacang tanah, dan tanaman palawija lainnya. Bahkan Wawan juga mendorong adanya integrasi usaha ekonomi petani dengan menyediakan ternak (sapi dan kambing) di lingkaran petani kapas.

"Kita berpikir bagaimana membuat analisis usaha itu menarik, *income* datang dari tumpang sari dan integrasi ternak. Selain itu, karena program kapas organik membutuhkan pupuk alami (kohe), proyek ini dipromosikan untuk program kembali ke alam," ungkap Wawan.

Lantas apa alasan memilih Lombok Utara? Dosen Universitas Mataram ini menjelaskan, dirinya melihat karakter wilayah. Zaman dulu (1980-an), masyarakat KLU menanam kapas. Karakteris-

tik topografi wilayah (dominan lahan kering), daya dukung kearifan lokal (perajin tenun di wilayah Kecamatan Bayan), serta eksistensi petani yang sudah berkelompok di bawah binaan Guru Besar Fakultas Pertanian Unram, Prof. Ir. Suwardji, M. App.Sc., Ph.D., merupakan modal awal yang kuat di area hulu. Faktor inilah yang membuatnya tidak ragu terjun pada Riset Kapas Organik. Sejati Farm Lombok miliknya juga bersedia berkolaborasi dengan berbagai lembaga.

Wawan menegaskan, aktivitas hulu nantinya akan didukung oleh sumberdaya hilir sebagai penyedia pasar. Dalam hal ini, Sukkha Citta selaku pelaku bisnis tekstil dalam negeri yang dimiliki oleh investor asal Jerman, digandeng untuk menyerap hasil produksi petani.

"Tugas kita adalah mengembalikan motivasi petani dengan menyediakan analisis hasil usaha tani yang menjan-

jakan. Kita bantu nanti menghitung nilai tambah dengan kombinasi berbagai tanaman dan peternakan," ujarnya.

Sebagai akademisi, Wawan tidak ingin mengajak petani di KLU hanya menerawang konsep saja. Dirinya juga bertindak selaku praktisi dimana dirinya terlibat di dalam Tim Investment Export ternak sapi ke negara Brunei Darussalam. Pengalaman dan link yang sudah ada, akan ia buka untuk menjembatani suksesnya proyek Kapas Organik di KLU hingga NTB di masa depan.

Pada riset kedua ini, Sejati Farm dan lintas lembaga yang bermitra, akan mendukung penelitian ilmiah di area 5 hektar. Penelitian akan melibatkan sejumlah mahasiswa S1 dan S2 dengan difasilitasi bantuan biaya riset.

Wawan menegaskan, pihaknya akan lebih fokus pada riset kedua sebagai cikal bakal pengembangan jangka panjang melibatkan petani inklusif. Sebab, dirinya meny-

dari bahwa sampai saat ini, kebutuhan kapas dalam negeri masih dipasok oleh petani dari berbagai negara. "Status Indonesia sampai saat masih impor kapas sampai 90 persen," imbuhnya.

Metode budidaya yang dibangun di KLU ke depan, diayaratkan akan menjadi sebuah model bagi pengembangan kapas di NTB. Selain percontohan dimana komitmen terbangun dari akar rumput hingga manajemen rantai pasar, budidaya jangka panjang diupayakan sebagai solusi untuk menaikkan grade nilai tukar petani.

Sebagai bahan baku non primer yang tidak bisa dikonsumsi langsung, maka Sejati Farm menilai semua pihak yang terlibat harus berani mengembangkan secara industri. "Yang paling penting, petani dibantu analisa usaha tani. Tanpa ini, program apapun akan gagal karena tidak ada daya tarik. Kita juga menyiapkan market yang bertindak sebagai pembeli langsung. Har-




RISET LANJUTAN - Riset lanjutan Kapas Organik Diproyeksi sebagai Model Percontohan Pengembangan Kapas di NTB.

ga beli perusahaan mengikuti Citta, menyerap lebih tinggi dari harga pasar karena komoditas bergerak di isu lingkungan," tandasnya. (ari)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	BPDPKS Catat Penyaluran Dana Program PSR Capai Rp9,42 Triliun	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	6	
Author	Bari/Ant	


BPDPKS Catat Penyaluran Dana Program PSR Capai Rp9,42 Triliun

NERACA

Jakarta - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat penyaluran dana untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah mencapai Rp9,42 triliun selama periode 2017 sampai dengan 31 Mei 2024. Pendanaan PSR tersebut disalurkan untuk 151.185 pekebun dan luasan lahan 336.834 hektar (ha).

"Ini ada perkebunan rakyat 6,30 juta hektar, artinya potensi PSR 2,8 juta hektar. Sekarang baru tercapai 336.834 hektar. Sampai saat ini, masih banyak sebetulnya ruang yang ada di sana," kata Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS Kabul Wijayanto dalam acara Seminar Sawit 2024 dengan tema Menakar Keseimbangan Produksi CPO untuk Kebutuhan Domestik & Ekspor: Urgensi dan Tantangan, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Sampai dengan Mei 2024, berdasarkan buku statistik Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, tercatat realisasi PSR sebesar 336.834 ha atau 0,33 juta ha. Kabul menilai masih terdapat potensi lahan PSR seluas 2,8 juta ha. Dalam paparannya, ia sempat menyampaikan keraguannya terhadap target Kementerian Pertanian (Kementan) untuk penanaman ulang atau *replanting* dalam PSR 2024 yang sebesar 120.000 ha. ● bari/ant

Title	Satu Data, Langkah menuju Perkebunan Berkelanjutan	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Gro/ant	

Satu Data, Langkah menuju Perkebunan Berkelanjutan

NERACA

Banten - Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) Heru Tri Widarto mengungkapkan data adalah aset yang berharga, data lebih berharga dari minyak bumi.

Pemerintah terus melakukan validasi, sinkronisasi, dan finalisasi data statistik Perkebunan Rakyat (PR), yang dihadiri oleh seluruh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, Badan Pusat Statistik - RI, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, serta Direktorat teknis lingkup Ditjen. Perkebunan.

Heru juga menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan tanpa menggunakan data yang tepat dapat berakibat fatal dan tidak mencapai target yang diinginkan. "Dalam hal ini pentingnya menyediakan data dan informasi berkualitas, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang berfokus pada integrasi data secara nasional," jelas Heru dalam acara Penyusunan Data Statistik Angka Tetap 2023.

Herupun menekankan bahwa data merupakan elemen vital dalam semua aspek perencanaan pembangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Data yang akurat dan relevan diperlukan untuk analisis kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi dasar bagi perencanaan yang efektif. Selain itu, data berperan penting dalam monitoring, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Hal tersebut senada dengan arahan Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun), Kementan Andi Nur Alam Syah, yang pernah mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan di sub sektor perkebunan adalah dengan melaksanakan sinkronisasi data statistik perkebunan melalui inisiatif "Satu Data Statistik Perkebunan Indonesia".

Kami mengapresiasi kerjasama dan kolaborasi antara Ditjen Perkebunan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI dan Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian, yang dinilai telah memberikan kontribusi besar terhadap kualitas dan transparansi data sektor perkebunan, terutama dalam publikasi data statistik perkebunan.

"Kerjasama ini memastikan data yang dipublikasikan dapat dipercaya dan mendukung kebijakan serta pengambilan keputusan di sektor perkebunan," kata Heru.

Selain itu pada kesempatan ini, disampaikan beberapa hal yang menjadi konsen Direktorat Jenderal

perkebunan di bidang data seperti (1). review dan pembaruan Pedoman Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP), sebagai acuan petugas pengelola data dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat, (2). Pelaporan data melalui aplikasi e-statistik perkebunan untuk memudahkan akses, pelaporan, dan penyiapan data tanpa dibatasi ruang dan waktu, (3). Penyampaian data tutupan kelapa sawit hasil reevaluasi tahun 2023 sebesar 17,19 juta hektar, (4). Penyediaan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) izin usaha perkebunan, peta lahan perkebunan dan peta tutupan kelapa sawit.

Sebelumnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS) menyebut, perbedaan data dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) maupun asosiasi menjadi tantangan utama yang dihadapi industri kelapa sawit Indonesia.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BDPKS Kabul Wijayanto menilai, belum adanya 'satu data' terkait luas lahan perkebunan kelapa sawit, jumlah produksi, sampai dengan jumlah petani kelapa sawit Indonesia turut menghambat pengembangan industri kelapa sawit.

Sebagai salah satu contoh, ia menyoroti perbedaan data antara Buku Statistik Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2021-2023,

dengan data luas lahan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 833/KPT-S/SR.020/M/12/2019.


"Kalau saya coba merfer pada data statistik perkebunan, itu tahun 2019 sudah keluar (data) dari Kementerian Pertanian yang 16,38 juta (hektare). Tapi di data statistik (Ditjen Perkebunan) itu tidak ada pak, tahu-tahu di tahun 2021 sampai 2023 berubah menjadi 16,83 juta hektare, dan ditambahkan dengan ada luas yang harus dikonfirmasi, ini PR," kata Kabul mengutip laman Antara.

Menurut Kabul, hal yang sama juga terjadi di tingkat Dinas Perkebunan masing-masing daerah. Pemadanan data masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah agar dapat mengembangkan industri kelapa sawit.

Di samping perlunya pemadanan data, Kabul mengatakan bahwa industri kelapa sawit Indonesia masih mempunyai potensi besar untuk meningkatkan produktivitasnya.

Menurut data statistik dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, luas lahan sawit yang dimiliki oleh petani rakyat mencapai 6,04 juta hektare dengan 2,5 juta petani rakyat.

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 142 ribu petani ikut serta dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan jumlah bertambah menjadi 151 ribu pada Mei 2024. @gro/ant

Title	Akuisisi Beras Kamboja Tak Pengaruhi Industri Lokal	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Gro/ant	

Akuisisi Beras Kamboja Tak Pengaruhi Industri Lokal

NERACA

Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan bahwa kerja sama ekonomi dan investasi pangan dengan Kamboja tidak akan mengganggu produksi beras dalam negeri khususnya industri penggilingan kecil.

Bayu mengatakan, akuisisi Bulog terhadap sumber beras dari Kamboja merupakan langkah pemerintah untuk mengamankan stok beras jika Indonesia membutuhkan impor. Namun, apabila Indonesia tidak membutuhkannya maka beras tersebut akan dijual lagi di pasar lelang.

"Kenapa harus khawatir, kalau saya punya beras atau Bulog punya beras di Kamboja, kalau kita butuh, tinggal kita ambil. Kalau kita enggak butuh, ya di trading saja internasional," ujar Bayu mengutip laman Antara.

Menurut Bayu, dengan mengakuisisi sumber beras di Kamboja, Indonesia sudah memiliki stok tanpa kebingungan mencari produsen. Hal ini juga sebagai langkah antisipasi kesulitan mendapat beras impor lantaran banyak negara yang mulai menutup ekspor beras.

"Kita bikin bisa buka agendisan gitu, terus nanti kalau sudah bisa jalan dengan bagus, saling lihat situasi, (misalnya) gimana

kalau kita belinya di penggilingan mereka gitu dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah langkah untuk memastikan lebih bisa menjamin pasokan kalau kita perlu," kata Bayu.

Bayu menyampaikan, saat ini pemerintah masih dalam proses untuk perusahaan mana yang akan diakuisisi. Menurutnya, banyak pertimbangan yang harus dilakukan mulai dari konsultasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, pihak bank dan lainnya.

Lebih lanjut, akuisisi sumber beras merupakan pekerjaan jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu hitungan minggu.

"Saya akan melakukannya tahap demi tahap, sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Kita lihat aja," ujar Bayu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Perum Bulog akan melakukan akuisisi sumber beras dari Kamboja.

"Bulog juga akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja. Presiden (Joko Widodo) tadi sudah memerintahkan saya untuk kita tindak lanjuti," kata Luhut.

Luhut menyampaikan bahwa akuisisi tersebut dilakukan atas perintah dari

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Luhut menyatakan bahwa dirinya telah mendapat perintah langsung dari Kepala Negara untuk menindaklanjuti proses akuisisi tersebut. "Dan memang sudah ditindaklanjuti, sekarang tinggal kita melakukan," ucap Luhut.

Terkait beras, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, "pompanisasi ini bisa meningkatkan produksi beras (Jawa Tengah.red) sebanyak 1,2 juta ton. Kalau kita konversi ke dalam nilai uang, berarti setara 10 triliun rupiah. Jadi bantuan yang kita berikan ini tidak seberapa bila dibandingkan nilai yang kita dapat."

Amran menambahkan, "satu sisi sawah ini butuh air. Disisi lain air (di Sungai Comal.red) melimpah. Kemudian kita pertemukan air dengan sawah melalui pompanisasi. Inilah solusi cepat untuk tingkatkan produksi."

Amran pun mengharapkan semua pompa bisa cepat terpasang. "Kalau sudah terpasang semua, saya akan berkunjung lagi," janji Amran.

Amran pun mengungkapkan, pompanisasi bisa meningkatkan produksi antara tiga hingga empat juta ton. Jika produksi bisa meningkat, ia meyakini pendapatan petani juga


bisa turut meningkat. "Ini yang kita harapkan, produksi meningkat, pendapatan petani bertambah, dan NTP pun ikut naik," ungkap Amran.

Sebelumnya, Amran mengaku optimis program pompanisasi bisa memacu aktivitas tanam di musim kedua tahun ini agar berjalan lebih cepat dan maksimal.

Amran menuturkan program pompanisasi ini dikonsentrasikan untuk lahan sawah yang indeks pertanamannya (IP) satu namun memiliki sumber air yang tersedia sepanjang tahun. Artinya lahan-lahan sawah tersebut hanya mampu tanam satu kali dalam setahun. Program ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman yang tadinya hanya satu menjadi dua atau lebih dalam setahun.

"Kita sudah identifikasi ada 300.000 hektar, lahan yang IP satu, kita angkat menjadi dua atau tiga. Kalau kita angkat IP nya dua kali saja, produksi 5 ton, berarti itu bisa 1.000.000 tambahan bisa dari Jawa Tengah, ini bisa jadi potensi luar biasa, dan kami siapkan pompa, inilah solusi cepat untuk menangani pangan" terang Amran.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan pompanisasi dapat membantu aktivitas tanam petani dilapangan. Petani akan lebih mudah dan cepat melakukan olah tanah dan tanam. ● gro/ant

Title	Produksi Padi Terancam Anjlok	 Kementerian Pertanian
Date	21 Juni 2024	
Media	Nusa Bali	
Page	11	
Author	Nusa Bali	

RI Mulai Dilanda Kemarau

Produksi Padi Terancam Anjlok



• ANTARA

JAKARTA, NusaBali

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mulai memasuki musim kemarau panjang pada Juni hingga September 2024. Menurutnya tantangan cuaca itu akan berdampak pada penurunan produksi padi ke depan.

"Berdasarkan surat BMKG perihal kesiap-siagaan kekeringan, maka musim kemarau di Indonesia diprediksi mulai bulan Juni sampai September 2024 dan

puncaknya Agustus 2024," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, seperti dilansir detikcom, Kamis (20/6).

Saat ini luasan tanam padi di Indonesia juga telah menurun signifikan. Menurut dia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak Oktober 2023 sampai April 2024, luas tanam padi sudah menurun 36,9%.

"Luas tanam padi pada masa tanam Oktober 2023 sampai April 2025 6,55 juta ha menga-

lami penurunan 3,8 juta ha atau 36,9%. Jika dibandingkan rerata periode yang sama 2015 sampai 2019 yaitu 10,3 juta ha," ucapnya.

Amran menyebut, jika situasi penurunan luas tanam berlanjut, maka dampaknya pada merosotnya jumlah produksi padi.

"Penurunan luas tanam berpengaruh pada luas panen, dan pada gilirannya berdampak pada penurunan padi yang dihasilkan," ungkapnya.

Amran mengatakan sebenarnya produksi sampai September 2024 masih terbilang aman, namun dia menyebut belum mengetahui kondisi Oktober hingga Desember. Karena pihaknya belum tahu berapa besaran lahan yang bisa ditanami.

"Januari, Februari shortage (kekurangan) yang ditanam Pak Wandu, pasti kita kekurangan Januari, karena ditanam hanya 500.000 ha, kalau 1 juta baru kita aman. Jadi 3 bulan kita sudah tahu. Sampai sekarang kita aman, sampai September kita aman Insyaallah. Tetapi yang berbahaya Oktober, November, Desember karena belum tahu berapa kita mampu tanam," ungkapnya. 

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**